

**ANCAMAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PASCA
PEMBENTUKAN ALIANSI AUKUS (2021-2023)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ICHANRIILHAMADHA PRIATMA

18323115

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**ANCAMAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PASCA
PEMBENTUKAN ALIANSI AUKUS (2021-2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ICHANRI ILHAM ADHA PRIATMA

18323115

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANCAMAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA PASCA
PEMBENTUKAN ALIANSI AUKUS (2021-2023)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

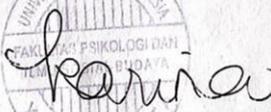
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

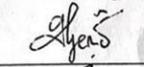
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan





Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas. Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme. Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.



Yogyakarta, 11 November 2023,

Handwritten signature of Ichanri Ilham Adha Priatma.

ICHANRI ILHAM ADHA PRIATMA

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
Pernyataan Integritas Akademik.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB 2 Ancaman Keamanan <i>Aggregate Power & Geographic Proximity</i> Australia Bagi Indonesia Pasca Pembentukan Aliansi Aukus 2021-2023.....	18
2.1 Ancaman Keamanan <i>Aggregate Power</i> Australia Bagi Indonesia.....	18
2.2 Ancaman Keamanan <i>Geographic Proximity</i> Australia Bagi Indonesia	25
BAB 3 Ancaman Keamanan <i>Offensive Capability & Aggressive Intentions</i> Australia Bagi Indonesia Pasca Pembentukan Aliansi Aukus 2021-2023.....	33
3.1 Ancaman Keamanan <i>Offensive Capability/Power</i> Australia Bagi Indonesia.....	33
3.2 Ancaman Keamanan <i>Aggressive Intentions</i> Australia Bagi Indonesia ...	44
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51

4.2 Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Populasi Penduduk Australia- Indonesia tahun 2021-2023.....	19
Tabel 2.2 Alokasi Dana Pertahanan Australia-Indonesia tahun 2021-2023	24
Tabel 3.1 Perbandingan kekuatan Militer Indonesia-Australia 2023.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Batas Maritim Indonesia-Australia.....	26
Gambar 2.2 Batas Maritim Indonesia-Australia	27

DAFTAR SINGKATAN

AARGM-ER	: <i>Advanced Anti- Radiation Guided Missile-Extended Range</i>
ADF	: <i>Australian Defence Force</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>
ASC	: <i>Australian Submarine Corporation Pty Limited</i>
AUKUS	: <i>Australia-UK-US</i>
AURAS	: <i>AUKUS Undersea Robotics Autonomous Systems</i>
AQuA	: <i>AUKUS Quantum Arrangement</i>
BRI	: <i>Belt Road Initiative</i>
CSP	: <i>Comprehensive Strategic Partnership</i>
DFC	: <i>Australian Defence Force</i>
DSME	: <i>Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd</i>
ENNPIA	: <i>The Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GMA	: <i>Global Maritime Axis</i>
GWPC	: <i>Guided Weapon Production Capability</i>
HARM	: <i>High Speed Anti Radiation Missile</i>
HEAT	: <i>High Explosive Anti Tank</i>
HIMARS	: <i>High Mobility Artillery Rocket Systems</i>
IAD	: <i>Integrated Air Defence</i>
LCS	: <i>Laut Cina Selatan</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MTCR	: <i>Missile Technology Control Regime</i>
PAL	: <i>PT Penataran Laut</i>
PMN	: <i>Penyertaan Modal Negara</i>

PPB-R	: <i>Pacific Patrol Boat Replacement</i>
RAA	: <i>Japan-Australia Reciprocal Access Agreement</i>
SEANWFZ	: <i>Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone</i>
SSN	: <i>Submersible Ship Nuclear</i>
SSBN	: <i>Submersible Ship Ballistic Missile Nuclear</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UK	: United Kingdom
US	: United State
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Pembentukan aliansi AUKUS pada tahun 2021 merupakan pakta pertahanan yang dapat menjadi ancaman keamanan. Bergabungnya Australia bersama AUKUS menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Australia menjadi ancaman keamanan bagi Indonesia pasca pembentukan aliansi AUKUS tahun 2021-2023 menggunakan empat faktor berdasarkan Teori *Balance of Threat* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara *Aggregate Power* Australia melalui kerja sama pembentukan kapal selam tenaga nuklir, kesepakatan ENNPIA, AURAS, dan AQuA, serta kalkulasi GDP dan anggaran pertahanan lebih unggul; secara *Geographic Proximity* Australia memberikan ancaman keamanan terhadap Indonesia yang berada di wilayah konflik Tiongkok-AS yang memicu perlombaan senjata dan proyeksi kekuasaan; secara *Offensive Capability* keputusan Australia dalam peningkatan kapabilitas kapal selam dan rudal mampu meningkatkan serangan yang lebih masif terhadap Indonesia; dan secara *Aggressive Intentions* yang dilakukan Australia beberapa tahun terakhir merupakan bentuk upaya agresif untuk meningkatkan kapabilitasnya secara signifikan dan dapat dilakukan ke Indonesia sewaktu-waktu. Oleh karena itu, berdasarkan empat faktor tersebut dapat dilihat bahwa Australia pasca bergabung bersama AUKUS dapat menjadi ancaman keamanan dan pertahanan bagi Indonesia.

Kata Kunci : Ancaman, AUKUS, Australia, *Balance of Threat*, Indonesia

ABSTRACT

The formation of the AUKUS alliance in 2021 is a defense pact that could pose a security threat. Australia joining AUKUS poses a serious threat to Indonesia. This research aims to analyze why Australia has become a security threat to Indonesia after the formation of the AUKUS alliance in 2021-2023 using four factors based on the Balance of Threat Theory proposed by Stephen M. Walt. The results of the research show that: Australia's Aggregate Power through cooperation in the formation of nuclear powered submarines, the ENNPIA, AURAS, and AQuA agreements, as well as GDP and defense budget calculations are superior; Geographically Proximity Australia poses a security threat to Indonesia which is in the Sino-US conflict area which triggers an arms race and projection of power; Offensive capability Australia's decision to increase submarine and missile capabilities is capable of increasing more massive attacks against Indonesia; and the aggressive intentions carried out by Australia in the last few years are a form of aggressive effort to increase its capabilities significantly and can be carried out to Indonesia at any time. Therefore, based on these four factors, it can be seen that Australia after joining AUKUS could become a security and defense threat to Indonesia.

Keywords : AUKUS, Australia, *Balance of Threat*, Indonesia, Threat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Indonesia dan Australia seringkali berada pada posisi konflik dan harmonis seiring perkembangannya. Namun, kedua negara kerap melalui berbagai upaya untuk membangun kembali hubungan yang baik, terutama dalam mencapai kepentingan bersama untuk melakukan kerja sama. Kondisi geografis yang dekat antara kedua negara yang dikelilingi samudera juga mendorong keduanya untuk tetap menjalin hubungan baik dan bekerja sama dalam memperkuat sektor pertahanannya melalui berbagai strategi.

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa terdapat potensi besar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) atau *Global Maritime Axis* (GMA) melalui konsep Poros Maritim Dunia sebagai visi nasional dan agenda pembangunan. Strategi ini merupakan implementasi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar maritim dan pengaruh besar diplomasi maritim (Santoso and Nafisah 2018). Begitu pula pernyataan Australia melalui *Defence White Paper* tahun 2016 yang memiliki kepentingan yang sama bahwa hubungan yang kuat dan produktif dengan Indonesia sangat penting bagi keamanan nasionalnya, sebab keduanya memiliki perbatasan maritim dan kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Isu keamanan dan stabilitas maritim, perdagangan dan investasi bebas, kontra-terorisme, dan penyelundupan manusia merupakan kepentingan bersama, sehingga Australia menyambut baik inisiasi Indonesia untuk fokus terhadap sektor maritim dan upaya kerja sama yang lebih baik dalam

keamanan maritim demi berkontribusi terhadap kawasan yang stabil dan sejahtera (Australia Government Department of Defence 2016).

Pada 26 Februari 2017, Indonesia-Australia menunjukkan langkah serius dalam melakukan kerja sama pertahanan sektor maritim melalui penandatanganan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* yang disepakati Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Deklarasi tersebut kemudian diimplementasikan melalui *Maritime Cooperation Plan of Action* yang disepakati pada tahun 2018 yang meliputi sembilan fokus area kerja sama, yakni; Pengembangan ekonomi, konektivitas maritim dan *blue Economy*; Memperkuat keamanan maritim dan melawan kejahatan transnasional di laut; Memerangi *illegal, unreported, and unregulated fishing* serta kejahatan di bidang perikanan; Meningkatkan keselamatan maritim dan mencegah serta menanggapi pencemaran lingkungan laut; Meningkatkan koordinasi pencarian dan penyelamatan serta manajemen risiko bencana; Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; Pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan *blue carbon*; Warisan budaya maritim; Serta peningkatan dialog dan keterlibatan dalam forum regional dan multilateral (Australia Government 2018)

Kerja sama dalam sektor tersebut kembali ditingkatkan melalui Kesepakatan kerja sama komprehensif Indonesia-Australia atau *Comprehensive Strategic Partnership (CSP)* pada tanggal 31 Agustus 2018 yang meliputi lima pilar utama kerja sama, yakni; Meningkatkan ekonomi dan kerja sama pembangunan; Konektivitas antar masyarakat; Keamanan dan kepentingan bersama kedua negara dan kawasan; Kerja sama maritim; Berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik (Australia Government Department of Foreign Affairs

and Trade 2020). Kesepakatan pembentukan CSP menjadi bukti bahwa kedua negara berkomitmen untuk melakukan kerja sama yang lebih serius di berbagai bidang dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Pada 15 September 2021, pembentukan Australia-UK-US (AUKUS) sebagai kerja sama atau aliansi pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) dapat dinilai sebagai fenomena yang dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan. Kerja sama keamanan trilateral tersebut ditujukan untuk mempromosikan kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta mewujudkan integrasi tingkat tinggi ketiga negara terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, industri, maupun suplai militer. Selain itu, kerja sama ini juga merupakan aliansi militer trilateral yang baru muncul selama tiga dekade terakhir di kawasan Asia-Pasifik (Cheng 2022). Aliansi kerja sama AUKUS mencakup kapabilitas siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kapabilitas tambahan bawah laut. AUKUS memungkinkan Australia untuk memiliki delapan armada kapal selam tenaga nuklir dengan bantuan teknologi yang diberikan oleh AS dan Inggris. Berdasarkan catatan sejarah, AS dan Inggris hanya butuh beberapa tahun untuk mengganti *Submersible Ship Nuclear* (SSN) menjadi *Submersible Ship Ballistic Missile Nuclear* (SSBN) dan memungkinkan perubahan armada kapal selam bertenaga nuklir menjadi senjata nuklir (Nurfauzi, Lampita, and Mahendra 2022).

Pemerintah Indonesia turut memberikan respon atas pembentukan AUKUS. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menilai bahwa Indonesia khawatir terhadap adanya aliansi AUKUS yang dapat meningkatkan kemungkinan proyeksi kekuatan dan perlombaan senjata terjadi, sehingga dapat mengganggu stabilitas perdamaian di kawasan. Selain itu, Kondisi geografis Australia yang dekat dengan Indonesia

memungkinkan kapal selam nuklir dan alutsista Australia pasca bergabung bersama AUKUS berpotensi melewati zona teritorial Indonesia (Nindya and Abiyya 2022). Pembentukan AUKUS seolah-olah bertentangan dengan pilar kerja sama CSP yang telah disepakati dan merugikan Indonesia apabila Australia memprioritaskan AUKUS. Terbentuknya AUKUS menjadi sebuah kejutan bagi Indonesia, sebab Australia tidak melakukan diskusi terkait pembentukan aliansi itu meskipun beberapa hari sebelumnya terjadi pertemuan antara Indonesia-Australia dalam 2+2 *Meeting* untuk membahas agenda lanjutan CSP (Hafizh et al. 2023).

Respons internasional menganggap bahwa pembentukan AUKUS merupakan manuver yang dilakukan oleh AS dalam melawan hegemoni Tiongkok dalam mendominasi wilayah Asia, terutama melawan agenda Tiongkok terkait klaim Laut Cina Selatan (LCS) yang masih terjadi. Upaya dominasi dan mobilisasi militer AS merupakan sebuah langkah untuk memainkan peran penting terhadap konflik LCS. Agenda tersebut juga merupakan salah satu upaya AS dalam melindungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lama menjadi sahabat baik dan mitra kerja samanya, sehingga AS perlu menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan dukungan terhadap negaranya baik pada sektor politik maupun militer di sekitar wilayah LCS (Nindya and Abiyya 2022). Berbagai upaya AS melalui AUKUS juga dapat dianggap sebagai respon keras untuk mengatasi dan mencegah tindakan-tindakan serius yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan oleh Tiongkok demi mencapai kepentingannya di wilayah tersebut. Namun, kemunculan aliansi pertahanan AUKUS justru dapat menjadi potensi ancaman baru dan memberikan ancaman serius bagi stabilitas geopolitik Indo-Pasifik, khususnya Indonesia.

Hingga April 2022, ketiga negara AUKUS telah menunjukkan komitmennya secara serius berdasarkan perkembangan yang progresif, terutama dalam dua agenda utama. Tidak hanya peningkatan dalam inisiasi SSN, namun AUKUS juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam agenda melanjutkan kapabilitasnya. Cakupan kerja sama yang semula hanya meliputi empat bidang kerja sama (kapabilitas siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kapabilitas tambahan bawah laut), namun beberapa bulan kemudian diperluas empat cakupan lainnya, seperti: kemampuan hipersonik dan kontra-hipersonik, peperangan elektronik, pertukaran informasi, dan inovasi pertahanan. Di sisi lain, pengembangan hipersonik AUKUS dinilai mengkhawatirkan karena tiga hal.

Pertama, rudal hipersonik memiliki kemampuan luar biasa yang lebih mengancam dan tidak stabil daripada rudal biasa, sebab rudal hipersonik lima kali lebih cepat dari kecepatan suara mulai dari Mach 5 hingga Mach 20, sehingga kemampuan ofensif hipersonik sangat mengganggu stabilitas keamanan negara. Kedua, waktu pengembangan senjata dan teknologi hipersonik lebih singkat daripada pengembangan SSN, Menteri Pertahanan Australia menegaskan bahwa memungkinkan AUKUS untuk menghasilkan teknologi hipersonik yang lebih maju daripada kapal selam. Ketiga, tidak terdapat rezim internasional yang secara efektif mengatur proliferasi hipersonik, sebab *Missile Technology Control Regime* (MTCR) hanya mengatur senjata nuklir, kimia, dan biologi, sedangkan senjata hipersonik dapat digunakan dengan muatan konvensional (Alarsah 2022).

Pada 13 Maret 2023, pasca periode 18 bulan konsultasi optimal kerja sama untuk Australia sejak pembentukan AUKUS, PM Australia Anthony Albanese, PM Inggris Rishi Sunak, dan Presiden AS Joe Biden mengumumkan aturan bagi

Australia untuk memperoleh SSN yang dipersenjatai secara konvensional melalui AUKUS. SSN-AUKUS akan menjadi kapal selam canggih yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi kapal selam terbaik dari ketiga negara. Kapal selam tersebut akan didasarkan pada desain SSN generasi terbaru Inggris dengan perpaduan teknologi kapal selam AS yang akan dibangun dan digunakan oleh Australia dan Inggris. Beberapa keuntungan strategis terkait program kapal selam tenaga nuklir yang akan didapat oleh Australia seperti pelatihan kapal selam Australia di AS dan Inggris yang telah dilakukan sejak tahun 2022, pelatihan militer Australia di atas kapal selam AS dan Inggris, pelatihan tenaga kerja industri dan teknis Australia, serta infrastruktur interoperabilitas terkait kemampuan pemeliharaan dan perbaikan kapal selam (The White House 2023).

Keputusan Australia untuk melakukan kerja sama dengan AUKUS dapat meningkatkan kapabilitas militernya secara signifikan dan tentunya dapat menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Pembentukan AUKUS yang dinilai sebagai agenda keras AS dalam melawan Tiongkok dapat berdampak terhadap hubungan Indonesia-Australia, sebab Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan Tiongkok. Terlepas dari kerja sama komprehensif CSP yang menunjukkan keharmonisan Indonesia-Australia, berbagai fenomena yang terjadi terkait pembentukan dan perkembangan Australia bersama AUKUS dapat dinilai sebagai ancaman terhadap Indonesia, baik dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penulis ingin menggali lebih dalam dan melakukan penelitian terhadap ancaman Australia pasca pembentukan AUKUS dapat menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia melalui Teori *Balance of Threat* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Australia menjadi ancaman keamanan bagi Indonesia pasca pembentukan aliansi AUKUS 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengapa Australia sebagai ancaman pasca pembentukan AUKUS terhadap Indonesia pada tahun 2021-2023, yaitu:

1. Untuk menjelaskan ancaman yang terjadi terhadap keamanan Indonesia pasca pembentukan AUKUS. Serta, melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi Indonesia pasca Australia mendeklarasikan pembentukan aliansi bersama Inggris dan Amerika Serikat.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil batasan waktu antara tahun 2021 hingga tahun 2023. Pengambilan batasan waktu tersebut, sebab pada tahun 2021 Australia memilih bergabung pada kerja sama pertahanan AUKUS dan pada tahun 2023 program kerja sama AUKUS masih dalam proses perkembangan dan terus berjalan. Penulis mengambil fokus pembahasan berdasarkan keputusan kedua negara yang menyepakati peningkatan kerja sama demi kepentingan bersama, meskipun dinamika hubungan keduanya sempat terjadi sebelumnya. Namun, bergabungnya Australia ke dalam aliansi pertahanan AUKUS seolah-olah dapat menghambat kerja sama antara Indonesia-Australia serta menjadi ancaman bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan

Tiongkok, sehingga hal tersebut dapat dilihat sebagai salah satu faktor pendorong mengapa Australia dapat dianggap menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, empat faktor dalam *Teori Balance of Threat* dapat membantu penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal berjudul “*The Impact of AUKUS in Indonesian Perspective: Regional Military Balance and Security Dilemma*” yang ditulis oleh Alifsar Nurfauzi, Frisca Lampita, dan Muhammad Rizky Mahendra menjelaskan bahwa pembentukan AUKUS memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, khususnya terkait keseimbangan militer kawasan dan dilema keamanan. Pemerintah Indonesia melangkah secara hati-hati dan memperhatikan persaingan persenjataan dan proyeksi kekuasaan yang dapat terjadi kedepannya. Analisis jurnal ini mengarah pada keputusan Australia untuk meningkatkan kekuatannya justru memberikan dilema keamanan kepada Indonesia yang terjebak dalam dua kekuatan besar antara Tiongkok dan AS. Keterkaitan Jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan AUKUS yang dapat memberikan dampak bagi Indonesia berdasarkan Teori *Regional Security Complex* dan *Security Dilemma*, namun penulis ditujukan untuk menganalisis seberapa besar tingkat ancaman yang diberikan oleh Australia berdasarkan Teori *Balance of Threat*.

Jurnal berjudul “Implementasi Kemitraan Strategis Indonesia-Australia Pasca Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS” yang ditulis oleh, Al Hafizh, Pradono Budi Saputro, Laode Muhammad Fathun dan Gerald Theodorus L. Toruan menjelaskan bahwa meskipun Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang dinamis, keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan kerja sama pada tahun

2018 melalui *Comprehensive Strategic Partnership (CSP)* yang terdiri dari lima pilar. Keputusan Australia untuk membentuk AUKUS dianggap bertentangan dengan pilar-pilar CSP, sehingga fokus analisis jurnal ini ditujukan untuk melihat implementasi CSP pasca pembentukan AUKUS. Keterkaitan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada konteks kerja sama strategis keduanya yang dapat terganggu akibat pembentukan AUKUS, sehingga akan berdampak pada ancaman yang lebih besar bagi Indonesia meskipun ternyata AUKUS tidak secara langsung menghambat CSP yang ditinjau melalui Teori Kemitraan Strategis, Konsep Aliansi Pertahanan, dan Konsep Keamanan Kolektif. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek yang membahas implementasi kerja sama CSP dan teori yang digunakan.

Annisa Putri Nindya dan Rifqy Alief Abiyya dalam jurnal berjudul “Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia” menjelaskan bahwa pembentukan AUKUS merupakan sebuah langkah untuk membendung agresivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Kemungkinan perlombaan senjata menjadi alasan kekhawatiran Indonesia terhadap munculnya AUKUS, sehingga Indonesia perlu memainkan kebijakan luar negerinya dengan tetap berpedoman politik bebas aktif. Jurnal ini menganalisis terkait kemunculan AUKUS dan posisi Indonesia menggunakan *Teori Regional Security Complex* dan *Offense-Defense* yang menghasilkan bahwa dinamika geopolitik Indo-Pasifik terus terjadi akibat persaingan berbagai pihak. Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan ancaman secara spesifik yang dihadapi Indonesia dan teori untuk menilai seberapa besar ancaman Australia bagi Indonesia.

Pada jurnal “Determinasi Pakta AUKUS terhadap Keamanan Kawasan Asia Tenggara“ yang ditulis oleh Adrianus Lengu Wene menjelaskan bahwa ofensifitas Tiongkok memiliki ambisi kekuatan regional di Asia Pasifik melalui *Belt Road Initiative* (BRI) dan klaim *nine dash line* menjadi ancaman bagi AS, sehingga manuver AS melalui AUKUS merupakan upaya *balance of power*. Konstelasi dua kekuatan besar antara AS dan Tiongkok menghadapkan negara-negara Asia Tenggara dalam keadaan dilematis. Jurnal ini menganalisis determinasi AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara yang berfokus pada sikap maupun kebijakan luar negeri negara kawasan Asia Tenggara dan ASEAN dengan tiga temuan, yakni; implikasi AUKUS yang bergantung pada sikap negara anggota ASEAN antara menciptakan stabilitas atau instabilitas kawasan; perbedaan respon negara anggota ASEAN menjadi bukti ketidakmampuan ASEAN dalam resolusi konflik maupun potensi konflik kawasan; dan pilihan *balancing*, *bandwagoning*, hingga menjaga keseimbangan dalam derajat yang berbeda antara AS dan Tiongkok sebagai pilihan rasional bagi negara anggota ASEAN. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan terkait sikap dan kebijakan negara anggota ASEAN dan ASEAN secara umum, sedangkan penulis pada penelitian ini ingin membahas secara dalam dan spesifik terkait ancaman secara khusus terhadap Indonesia. Teori yang digunakan sama dengan penelitian penulis namun terdapat perbedaan bahwa implementasi teori pada jurnal ini tidak menganalisis secara rinci terkait empat faktor dalam *Teori Balance of Threat*, melainkan membahas pilihan *balancing* dan *bandwagoning*.

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka di atas, dapat dilihat apabila penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan bahwa penelitian ini

melakukan analisis lebih dalam dan lebih spesifik terkait seberapa besar tingkat ancaman Australia bagi Indonesia pasca pembentukan AUKUS. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak membahas empat faktor yang menjadi tingkat ancaman bagi Indonesia berdasarkan Teori *Balance of Threat*, sehingga tema penelitian ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor tingkat ancaman yang diberikan oleh Australia terhadap Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan Teori *Balance of Threat* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt untuk membantu menganalisis pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini. Menurut Walt, ketika suatu negara dihadapkan dengan ancaman eksternal yang signifikan, negara dapat melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. *Balancing* dapat diartikan sebagai ikut bersekutu dengan yang lainnya untuk melawan ancaman yang ada, sedangkan *bandwagoning* dapat diartikan sebagai penyelarasan dengan sumber ancaman. Dua variabel yang berbeda itu adalah tentang bagaimana negara akan memilih aliansi mereka yang dapat diidentifikasi berdasarkan apakah negara tersebut bersekutu untuk melawan atau bersama dengan ancaman utama eksternal. Apabila *balancing* lebih umum daripada *bandwagoning*, maka negara lebih aman karena agresor akan menghadapi aliansi gabungan untuk melawan. Namun, apabila *bandwagoning* menjadi pilihan yang dominan, maka keamanan akan sulit didapat karena agresor yang berhasil akan menarik sekutu tambahan untuk meningkatkan kekuatan mereka sambil mengurangi kekuatan lawan (Walt 1990, 17).

Pada dasarnya, dua variabel di atas digunakan untuk mengukur strategi yang tepat bagi suatu negara dalam menghadapi ancaman demi keamanan negaranya,

namun penelitian ini akan mengambil fokus pada empat faktor yang menjadi kalkulasi suatu negara dalam mengukur ancaman yang dihadapi, sebab prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan fakta bahwa Indonesia memiliki kedekatan dengan dua kekuatan besar, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang akan mempengaruhi tingkat ancaman yang mungkin dihadapi oleh Indonesia, seperti:

1. *Aggregate Power* (Agregat Kekuatan)

Apabila semakin besar total sumber daya suatu negara (populasi, kapabilitas industri dan militer, dan kemampuan teknologi), maka semakin besar pula potensi ancaman suatu negara bagi negara lain. Total kekuatan yang dimiliki negara merupakan komponen penting dari ancaman yang dihasilkan terhadap negara lain. Selain itu, negara dengan kekuatan besar memiliki kapasitas untuk menghukum musuh atau memberikan hadiah kepada sekutu, sehingga agregat kekuatan negara dapat menjadi pilihan terhadap keputusan *balancing* atau *bandwagoning* (Walt 1990, 22–23).

2. *Geographic Proximity* (Kedekatan Geografis)

Kemampuan dalam memproyeksikan kekuatan menurun akibat jarak, maka negara yang dekat dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada negara yang jauh. Suatu negara cenderung membuat aliansinya sebagai respon terhadap kekuatan terdekat daripada respon bagi kekuatan yang jauh. Ancaman kedekatan dapat menjadi pilihan *balancing* atau *bandwagoning*, sehingga apabila ancaman terdekat memicu untuk *balancing*, maka aliansi sekitar untuk mengikuti adalah hal yang mungkin. Secara alternatif, ketika ancaman kekuatan yang dekat mengarah ke *bandwagoning*, maka fenomena lingkup pengaruh akan terbentuk. Oleh karena itu,

negara kecil yang berbatasan dengan kekuatan besar sangat rentan, sehingga mereka lebih melakukan *bandwagoning* daripada *balancing*, terutama apabila negara yang dekat dan kuat telah menunjukkan kemampuannya untuk memaksakan kepatuhan untuk negara kecil (Walt 1990, 23–24).

3. *Offensive Capability/Power* (Kekuatan Ofensif/Serangan)

Negara dengan kemampuan atau kekuatan ofensif yang besar lebih mungkin untuk melakukan provokasi aliansi daripada negara yang tidak mampu untuk menyerang karena kondisi geografi, postur militer, dan lainnya. Kekuatan ofensif adalah kemampuan untuk mengancam kedaulatan atau integritas teritorial negara lain dengan biaya yang dapat diterima. Kemudahan agregat kekuatan dapat diubah menjadi kekuatan ofensif (mengumpulkan kapabilitas militer bergerak yang besar) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keuntungan relatif terhadap serangan atau pertahanan dalam waktu tertentu. Ancaman langsung yang ditimbulkan kekuatan ofensif dapat menciptakan insentif yang kuat bagi negara lain untuk menyeimbangkan. Namun, apabila kekuatan ofensif memperbolehkan penaklukan dengan cepat, negara yang rentang mungkin melihat sedikit kemungkinan untuk melawan. *Balancing* terlihat tidak tepat apabila sekutu suatu negara mungkin tidak dapat memberikan bantuan yang cukup cepat. Oleh karena itu, kecenderungan ini menjadi salah satu alasan munculnya lingkup pengaruh bahwa negara yang dekat dengan negara kemampuan ofensif yang besar (jauh dari sekutu potensial) mungkin terpaksa melakukan *bandwagoning* akibat aliansi *balancing* tidak cukup baik (Walt 1990, 24-25).

4. *Aggressive Intentions* (Keinginan/Rencana Agresif)

Negara yang agresif cenderung melakukan provokasi negara lainnya untuk mengimbanginya dan negara dengan kemampuan yang sederhana dapat mendorong negara lain untuk menyeimbangkan apabila mereka dianggap sangat agresif. Suatu negara yang dipercayai untuk menjadi agresif dan tidak dapat dirubah, maka negara lainnya tidak mungkin untuk melakukan *bandwagoning*. Apabila intensi agresor tidak dapat diubah oleh aliansi bersamanya, maka negara yang rentan (bahkan jika bersekutu) kemungkinan besar menjadi korban, sehingga *balancing* dengan aliansi lain mungkin satu-satunya cara untuk menghindarinya. Oleh karena itu, semakin agresif suatu negara maka semakin besar kemungkinannya untuk memicu aliansi yang berlawanan (Walt 1990, 25–26).

Teori yang digunakan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang terdapat pada empat faktor tingkat ancaman, sebab empat faktor tersebut relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia pasca Australia membentuk aliansi AUKUS. Faktor-faktor tersebut menjadi alat analisis bagi penulis untuk mengukur tingkat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Faktor-faktor ancaman yang dapat terjadi terhadap Indonesia dalam Teori *Balance of Threat*, kebijakan Australia pasca bergabung dengan AUKUS dapat dikatakan sebagai ancaman didasarkan atas empat faktor. Pertama, *Aggregate Power* yang dimiliki oleh Australia pasca bergabung bersama AUKUS akan meningkat secara signifikan, serta peningkatan sumber daya pada sektor lainnya, terutama bantuan terhadap kapabilitas militer yang diberikan oleh AS dan Inggris. Kedua, *Geographic Proximity* antara Indonesia dan Australia sangat dekat dan

berbatasan langsung, sehingga Australia menjadi ancaman kuat yang dekat dengan wilayah Indonesia. Ketiga, *Offensive Capability/Power* yang dimiliki Australia meningkat secara signifikan atas kepemilikan kapal selam tenaga nuklir dan fasilitas persenjataan yang diberikan oleh AS-Inggris, sehingga menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia. Keempat, *Aggressive/Offensive Intentions* yang dilakukan Australia melalui berbagai tindakannya dapat dilihat sebagai strategi *balancing* untuk meningkatkan kapabilitas militernya secara signifikan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan mengancam Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif, sebab faktor-faktor yang menjadi tolak ukur bahwa Australia dapat menjadi ancaman bagi Indonesia merupakan suatu fenomena sosial dalam dinamika hubungan internasional, sehingga memerlukan metode deskriptif untuk menjelaskan fenomena tersebut dengan cara yang luas, dalam, dan menyeluruh berdasarkan sumber data yang valid.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini merupakan Australia sebagai negara yang mengambil kebijakan untuk bergabung sebagai anggota aliansi pertahanan dan mendeklarasikan AUKUS pada tahun 2021. Objek pada penelitian ini adalah ancaman yang dapat terjadi kepada Indonesia pasca Australia menjadi anggota AUKUS.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau data yang berasal dari studi kepustakaan atau literatur. Sumber data dapat berasal dari buku, jurnal, media, laporan penelitian, dan berbagai *website* terkait dengan tema dan kata kunci terkait tema penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian, penulis melakukan riset terkait tema penelitian hingga mendapatkan judul penelitian. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data sekunder yang relevan dengan tema penelitian melalui buku, jurnal, media, laporan penelitian, dan berbagai *website*. Proses terakhir yakni melakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah dengan teori yang digunakan hingga mendapatkan pemahaman terkait fenomena yang terjadi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, penulis akan membagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB 1: Pendahuluan mengenai latar belakang untuk menjelaskan secara singkat mengenai fenomena yang terjadi dan akan diteliti oleh penulis, hingga sistematika yang akan dibahas.

BAB 2: Ancaman Keamanan *Aggregate Power & Geographic Proximity* Australia Bagi Indonesia Pasca Pembentukan Aliansi Aukus 2021-2023.

BAB 3: Ancaman Keamanan *Offensive Capability & Aggressive Intentions* Australia Bagi Indonesia Pasca Pembentukan Aliansi Aukus 2021-2023.

BAB 4: Penutup mengenai kesimpulan penelitian dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2

Ancaman Keamanan *Aggregate Power & Geographic Proximity* Australia Bagi Indonesia Pasca Pembentukan Aliansi Aukus 2021-2023

Pada bab ini penulis akan berupaya menjabarkan faktor-faktor ancaman dari pembentukan Aukus sebagai ancaman Australia terhadap Indonesia yang dilihat melalui pandangan Stephen M. Walt sebagai landasan analisis. Pertama-tama penelitian ini akan mengkaji dalam *Aggregate power* dan *Geographic proximity* dari kedua negara yang dapat digunakan untuk menilai apakah Australia menjadi ancaman bagi Indonesia pasca pembentukan AUKUS.

2.1 Ancaman Keamanan *Aggregate Power* Australia Bagi Indonesia

Keamanan yang mengacu pada kondisi keselamatan dengan tidak adanya resiko, rasa takut, dan ancaman yang dapat dilihat dengan menggunakan konsep tradisional dan non-tradisional. Dalam pendekatan tradisional mengacu pada upaya melindungi sebuah negara dari kemungkinan invasi militer negara lain atau kelompok tertentu. Keamanan pada pendekatan non-tradisional tidak berkaitan dengan ancaman militer akan tetapi bergantung pada keamanan non-negara. Standar pertahanan dan kemandirian suatu negara dapat ditentukan oleh kemampuan atau kesiapannya dalam menghadapi potensi ancaman dari internal dan eksternal (Utami 2022).

Aggregate Power diukur melalui total sumber daya dari suatu negara (populasi, kapabilitas industri dan militer, serta kemampuan teknologi) yang dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan ancaman kepada negara lain karena semakin besarnya kekuatan tersebut membuat potensi ancaman semakin

bertambah. Selain itu, kekuatan yang besar dari suatu negara juga memiliki kapasitas untuk menghukum musuh atau memberikan hadiah kepada sekutu (Walt 1990, 22–23).

Dalam tingkat populasi pada tahun 2021-2023 antara Australia dan Indonesia yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Populasi Penduduk Australia- Indonesia tahun 2021-2023

Tahun	Australia	Indonesia
2021	25.422.788	272.682.500
2022	26.177.413	275.773.800
2023	26,439,111	278.696.200

Sumber : (Australian *Bureau of statistics 2021-2023* & Badan Pusat Statistik 2021-2023)

Pada tahun 2021-2023 Indonesia memiliki populasi yang lebih banyak dari Australia yaitu sebesar 272,68 jiwa pada 2021, kemudian pada 2022 populasi Indonesia Sebesar 275,77 juta dan pada tahun 2023 sebesar 278,69 juta sementara itu Australia hanya memiliki 25-26 juta jiwa dari 2021-2023 yang membuat Australia pada tahun 2021-2023 belum dapat dikategorikan sebagai ancaman dari Indonesia dalam tingkat populasi.

Meskipun dalam jumlah penduduk Australia lebih sedikit dari Indonesia, tetapi dalam hal kapabilitas industrinya pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Australia pada 2021 pertumbuhan ekonomi Australia sebesar \$1,5 Triliun dengan populasi penduduk 25 juta jiwa dan untuk tahun 2022 sebesar \$1.6 Triliun yang membuat Australia dapat masuk ke dalam kategori negara dengan ekonomi

yang stabil dan baik (World Bank 2023). Namun, Australia masih kekurangan sumber daya manusia untuk dapat mengeksploitasi dunia industrinya jika melihat kemampuan industri Australia yang mencakup dalam berbagai bidang seperti: Agribisnis, Pertambangan, Bioteknologi, Industri maritim, Perhiasan, Pakaian dan lain-lain. Australia menjadi pemimpin dunia dalam desain dan produksi kapal fiberglass, komposit dan aluminium karena memiliki kualitas yang tinggi dengan pasar utamanya Amerika Serikat dan Eropa serta Selandia Baru, Asia Tenggara dan Amerika Selatan (Australian Trade and Investment Commission 2023).

Pasca Australia bergabung ke dalam aliansi pertahanan AUKUS pada 2021, perjanjian pertahanan tersebut berfokus awal pada: pengembangan pertahanan kapabilitas siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, kapabilitas bawah laut dan kemudian diperluas dengan cakupan lainnya, yaitu: pertukaran informasi, kemampuan hipersonik dan kontra-hipersonik dan inovasi pertahanan antara Australia, United Kingdom (UK), dan United State (US). Adanya AUKUS memberikan industri tambahan untuk Australia pada bidang pembuatan kapal selam tenaga nuklir terutama Australia Selatan yang menjadi rumah bagi konstruksi kapal selam nuklir Australia, industri tersebut merupakan industri terbesar dan transformatif yang pernah ada untuk Australia karena adanya industri tersebut diperkirakan akan membutuhkan 20.000 pekerja selama 30 tahun ke depan. Tahun 2022 hingga 2023 pembangunan dan perawatan kapal selam Australia diperkirakan akan memberikan pekerjaan kepada 8.500 orang yang difokuskan untuk membangun serta merancang infrastruktur galangan kapal selam nuklir di Australia Selatan (Australian Government Department of Defence, 2023).

Sedangkan Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan penghasilan menengah pada tahun 2021 dengan pertumbuhan GDP sebesar \$1,18 Triliun dan jumlah populasi 272 juta jiwa dan pada 2022 sebesar \$1,3 Triliun dengan jumlah populasi 275 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari beberapa sektor, seperti: pertambangan, perkebunan, pariwisata dan manufaktur. Sektor manufaktur menjadi pendapatan terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan Indonesia dari manufaktur mencapai \$60,63 Miliar dari total ekspor nasional yaitu \$86,35 Miliar pada periode Januari hingga April 2023. Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia namun sumber daya alam Indonesia tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri pertahanan nasional karena kurangnya kemampuan secara finansial dalam mengembangkan industri pertahanan yang mengakibatkan Indonesia hanya dapat memproduksi senjata konvensional dan Alutsista pendukung hal tersebut menjadikan Indonesia masih mengandalkan pembelian Alutsista dari negara lain (World Bank 2023; Utami 2022; Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2023).

Adanya peningkatan dari kemampuan dan teknologi yang diterima Australia pasca bergabung ke dalam Aliansi AUKUS dapat dilihat dari implementasi kerjasama AUKUS yang telah direncanakan dan dimulai yaitu; AUKUS akan memberikan Australia kemampuan kapal selam nuklir dengan senjata konvensional dengan tetap menjunjung standar non-proliferasi nuklir, AUKUS akan mengembangkan dan menyediakan kemampuan militer gabungan yang canggih. Perdana menteri Australia, Inggris dan Presiden Amerika Serikat memberikan langkah penting dalam implementasi AUKUS yaitu: pada 8 Februari

2022 diberlakukannya Pertukaran Informasi Propulsi Nuklir Angkatan Laut atau *The Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement* (ENNPPIA) secara trilateral, pada Februari 2022 adanya pembentukan kelompok pengarah gabungan dari anggota-anggota AUKUS untuk mengembangkan jalur yang optimal (menentukan dasar pengelolaan nuklir, infrastruktur, tenaga kerja, kemampuan dan persyaratan industri) bagi Australia agar dapat memperoleh kapal selam tenaga nuklir, memberikan keterampilan dan pelatihan untuk kualifikasi yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian kapal selam tenaga nuklir, pada 7 Maret 2022 adanya perencanaan pembangunan pangkalan kapal selam baru yang dapat menunjang penempatan kapal selam nuklir (The White House 2022)

Selain kapal selam, implementasi AUKUS yang lainnya yaitu; kemampuan bawah laut dengan adanya pembuatan kendaraan bawah air otonom melalui *AUKUS Undersea Robotics Autonomous Systems* (AURAS) atau proyek Otonomi Robotika Bawah Laut AUKUS yang direncanakan pada tahun 2023 sebagai uji coba awal dan eksperimen kemampuan, mempercepat investasi untuk menghadirkan teknologi kuantum dengan fokus awal pada teknologi kuantum untuk menentukan posisi, navigasi dan pengaturan waktu dalam *AUKUS Quantum Arrangement* (AQuA) dan uji coba serta eksperimen yang akan dilakukan selama tiga tahun kedepan dari tahun 2022, adanya kerjasama dalam pengembangan kecerdasan buatan dan otonomi yang dipercaya dapat memberikan faktor penting kemampuan pasukan dimasa depan dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan keunggulan kemampuan diri dari ancaman dengan fokus awal pada percepatan adopsi dan peningkatan ketahanan sistem otonom dan berkemampuan AI dalam lingkungan yang

diperebutkan, penguatan kemampuan siber tingkat lanjut kerjasama tersebut termasuk melindungi sistem dan operasi penting, Kemampuan hipersonik dan kontra-hipersonik menjadi bidang dalam kerjasama aliansi AUKUS dimana anggota aliansi tersebut akan bekerjasama untuk mempercepat pengembangan kemampuan hipersonik dan kontra-hipersonik yang canggih, kerjasama dalam berbagi pemahaman tentang alat, teknik, dan teknologi pada spektrum elektromagnetik yang memungkinkan pasukannya dapat beroperasi di wilayah yang sedang diperebutkan, dan adanya inovasi pertahanan agar anggota AUKUS dapat mengintegrasikan teknologi komersial untuk menyelesaikan kebutuhan perang (The White House 2022)

Sedangkan perkembangan Indonesia dalam bidang teknologi bawah laut masih tertinggal karena keraguan politik dan kurangnya dukungan anggaran. Kementerian pertahanan dan Angkatan Laut Indonesia menekankan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kemampuan deteksi bawah airnya, salah satu ide yang ditawarkan ialah pemasangan jaringan deteksi bawah air yang serupa dengan sistem pengawasan suara Amerika Serikat di *chokepoints* strategis (selat Sunda, Lombok, dan Makassar). Pemerintah Indonesia pada 2021 menambahkan teknologi penginderaan bawah air sebagai salah satu dari 10 program prioritas industri pertahanan dalam negeri karena menganggap adanya peningkatan ancaman bawah laut (Alfiansyah and Malufti 2023). Pada bidang teknologi bawah laut lainnya, Indonesia saat ini hanya dapat melakukan proses penggabungan (*Joint Section*) kapal selam konvensional KRI Alugoro-405 (Susilo Eko 2023). Meskipun Indonesia telah berhasil melakukan proses penggabungan kapal selam, namun hal

tersebut masih tertinggal dengan kemampuan teknologi kapal selam bertenaga nuklir yang akan dimiliki Australia pasca bergabung dengan AUKUS.

Tabel 2.2 Alokasi Dana Pertahanan Australia-Indonesia tahun 2021-2023

Alokasi Dana Pertahanan (Tahun)	Australia (Juta)	Indonesia (Juta)
2021	\$44.3	\$8.8
2022	\$47,4	\$8.9
2023	\$52.16	\$8.8

Sumber : Sipri (Stockholm International Peace Research Institute 2021-2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi dana pertahanan dari Australia mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga saat ini. Australia mengalokasikan dana pertahanan untuk tahun 2021 sebesar \$44.3 juta dan pada 2022 mengalokasikan dana pertahanannya sebesar \$47,4 juta dan pada tahun 2023 alokasi dana Australia meningkat menjadi \$52,16 juta. Sedangkan Indonesia dari 2021-2023 hanya stagnan pada kisaran \$8,8 juta. Menurut (Global Fire Power 2023b) Australia saat ini berada pada posisi 6 besar dunia dalam hal anggaran dana pertahanan, sedangkan Indonesia berada pada peringkat 25 dunia.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Australia memiliki *Aggregate Power* yang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang 10 kali lebih besar, tidak dapat menjadi jaminan bahwa mereka mampu meminimalisir potensi ancaman dari Australia, sebab hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kapabilitas industri-militer dan kapabilitas teknologi yang tersedia. Disisi lain, Australia pasca bergabung dengan AUKUS memiliki kapabilitas industri-militer dan kemampuan teknologi yang jauh lebih unggul

dibandingkan Indonesia. Berbagai implementasi kerja sama terkait kapal selam tenaga nuklir hingga kemampuan teknologi militer melalui kesepakatan ENNPIA, AURAS, hingga AQuA membuktikan bahwa Australia mengambil langkah serius untuk meningkatkan kapabilitas militernya dan hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Begitu pula secara ekonomi, jumlah GDP dan anggaran pertahanan Australia yang jauh lebih besar turut mempengaruhi negara tersebut untuk semakin memperkuat sektor industri-militer dan teknologinya dari tahun ke tahun, terlebih lagi dengan bantuan negara anggota AUKUS. Oleh karena itu, semakin besarnya kekuatan agregat yang dimiliki Australia maka semakin tinggi potensi ancaman yang diberikan terhadap Indonesia karena negara dengan kekuatan yang lebih besar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengancam negara lainnya.

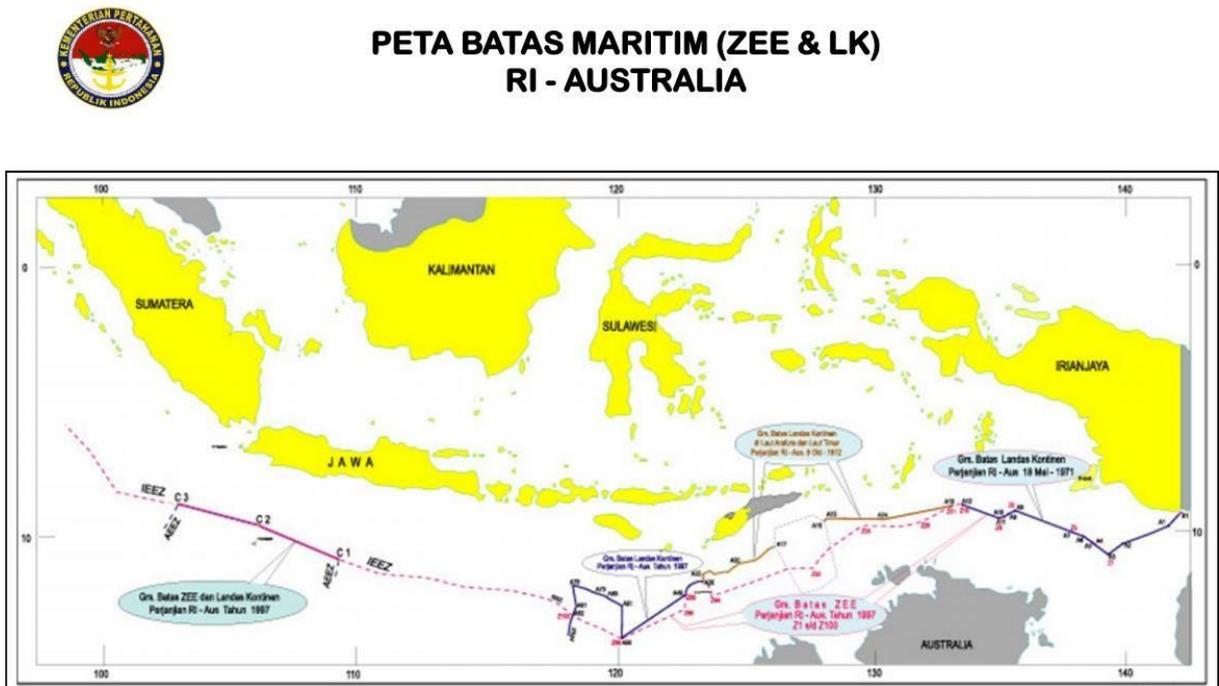
2.2 Ancaman Keamanan *Geographic Proximity* Australia Bagi Indonesia

Kedekatan geografis juga menjadi faktor dalam mengukur tingkat ancaman yang diterima sebuah negara karena kemampuan dalam memproyeksikan kekuatan menurun akibat jarak, maka negara yang dekat dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada negara yang jauh (Walt 1990, 23).

Secara Geografis Australia menjadi satu-satunya negara yang berada di benua Australia dengan luas wilayah sekitar 7.692.000 kilometer persegi yang didominasi oleh gurun pasir dan menjadi benua terkecil yang ada di Dunia saat ini serta berada di bagian selatan wilayah Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang dengan 17.466 Pulau menjadikan 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan dengan luas 3.257.357 kilometer persegi dan jarak antara Indonesia dan Australia bagian selatan ialah 3.457 kilometer. Pada perjanjian garis batas maritim Indonesia-Australia dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu: pertama, perjanjian garis batas Landas Kontinen yang ditandatangani di Canberra pada 18 Mei 1971 dan diratifikasi dengan Kepres No. 42 tahun 1971 yang terdiri dari 16 titik koordinat di perairan pantai Selatan Papua, Perairan Utara pantai Utara Papua dan Laut Arafura. Kedua, tambahan perjanjian perbatasan yang dilakukan pada 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Kepres No.66 tahun 1972 yang terdiri di Selatan Kep. Tanimbar pada laut Arafura dan Selatan Pulau Roti dan Pulau Timor. Ketiga, perjanjian perbatasan maritim pada 14 Maret 1997 yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen Indonesia-Australia dari perairan selatan Pulau Jawa dan perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia n.d.; Nurfebriansyah and Boediningsing 2023; V. K. M. Putri 2023)

Gambar 2.1 Peta Batas Maritim Indonesia-Australia

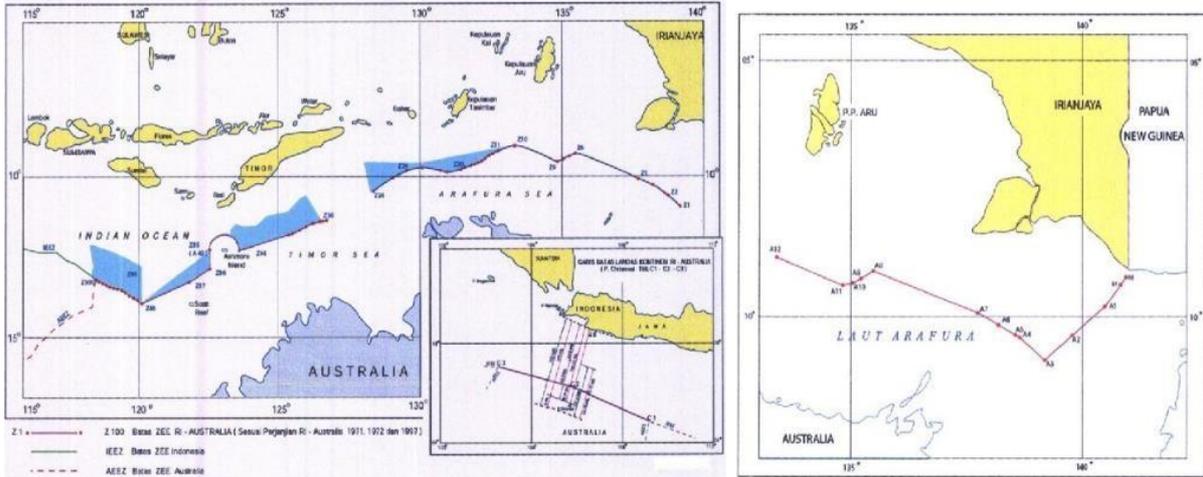


Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KemhanRI)

Gambar 2.2 Batas Maritim Indonesia-Australia



BATAS MARITIM RI - AUSTRALIA



Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen (1971), Perjanjian Penetapan Batas Dasar Laut Tertentu (1971), Hak Perikanan Tradisional Nelayan RI (1974); Keppres no.42/71 dan Keppres no.66/72.

Menetapkan 16 titik koordinat Garis Batas Landas Kontinen (1971).

Menetapkan 14 titik koordinat Batas Dasar Laut Tertentu (1972).

Australia ingin memberlakukan perundangan anti terorisme baru dengan memeriksa semua kapal sampai jauh dari batas yuridiksinya.

Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KemhanRI)

Pemerintah Indonesia dan Australia sejak lama telah melakukan perundingan tentang perbatasan dari kedua negara yang terletak di bagian selatan Indonesia atau bagian utara dari Australia. Pada 14 Maret 1997 di Perth, kedua negara tersebut melakukan penandatanganan perjanjian (Perth Treaty 1997) mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut dari perairan selatan Jawa dan batas kontinen antara Indonesia-Australia serta batas laut *Ashmore* dan Pulau Christmas (Wicaksono, Setyawanta R, and Susetyorini 2019).

Namun, *Perth treaty* belum dapat diberlakukan karena Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut dan merujuk pada pasal 11 perjanjian perth yang mengatakan bahwa perjanjian tersebut harus disahkan dan isi dari perjanjian akan

diberlakukan pada saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi. Indonesia dan Australia adalah beberapa negara yang meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, upaya hukum internasional dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dalam pemanfaatan laut dan klaim batas wilayah laut secara berlebihan ialah tujuan lahirnya UNCLOS 1982 (Ilahi and Harefa 2023).

Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen menjadi salah satu hal yang diatur dalam penentuan batas wilayah laut dari UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur dalam UNCLOS tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pantai. Namun, permasalahan yang dapat disebabkan dari peraturan tersebut adalah jika letak geografis dari negara-negara yang berbatasan saling berdekatan dan kurang dari 400 mil maka kemungkinan untuk adanya tumpang tindih wilayah laut serta perebutan klaim wilayah juga akan lebih tinggi terjadi (Wicaksono, Setyawanta R, and Susetyorini 2019).

Seperti yang terjadi pada kasus Pulau Pasir yang mana jaraknya sekitar 78 mil dari Pulau Rote Indonesia dan 190 mil dari daratan Australia. Pulau tersebut menjadi bagian dari yuridiksi Australia secara *de facto* karena merujuk dari hukum laut internasional yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *de jure* karena telah dilaksanakannya konservasi cagar alam di Ashmore Reef dan *effective governmental control* mengakibatkan dampak kepada Indonesia seperti: Kedaulatan negara terancam karena masuknya kapal patroli Australia ke dalam wilayah Indonesia, terjadinya *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Australia atau sebaliknya, pengelolaan Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan secara

maksimal dan kejahatan lintas negara berupa penyelundupan manusia, narkoba dan senjata api ilegal (Wicaksono, Setyawanta R, and Susetyorini 2019; D. Putri 2021).

Sejak abad 16 nelayan dari Indonesia mengambil ikan di daerah Ashmore dan Cartier serta menjadikan wilayah Ashmore sebagai tempat persinggahan. Setelah Australia menjadikan Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) sebagai cagar alam yang awalnya merupakan *fishing ground* mengakibatkan akses nelayan-nelayan tradisional dari Indonesia timur terutama yang berasal dari Papela Pulau Rote dan Sulawesi Utara untuk ke wilayah tersebut menjadi terbatas serta banyaknya nelayan yang ditangkap, diadili hingga dipenjarakan Australia karena wilayah tersebut masuk ke dalam yuridiksi Australia (D. Putri 2021). Ancaman yang ditimbulkan dari kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia selain dari isu Ashmore Reef ialah bergabungnya Australia dengan aliansi pertahanan AUKUS. Meskipun masuknya Australia ke dalam aliansi pertahanan AUKUS dipercaya sebagai respons dari agresivitas yang Tiongkok lakukan di kawasan Indo-Pasifik dengan melakukan klaim terhadap wilayah Laut Cina Selatan atas dasar *Nine Dash Line*, hal tersebut bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Pesatnya perkembangan militer Tiongkok dan adanya rencana pembangunan pangkalan militer di kawasan Pasifik Selatan serta agresivitas Tiongkok dalam melakukan klaim di wilayah tersebut yang dipercaya karena menginginkan sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. Meskipun Australia tidak mengatakan secara langsung bahwa Tiongkok sebagai ancaman tetapi respon Australia bergabung dengan aliansi AUKUS dipercaya sebagai respons dari Australia karena merasa terancam atas Tiongkok dan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik (Ulum and Windiani 2023).

Indonesia sebagai negara tetangga dari Australia akan merasa terancam dengan adanya pembuatan dan kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir dari Australia. Kawasan Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan bebas dari aktifitas nuklir pada sektor pertahanan mengakibatkan Indonesia tidak dapat memproduksi dan memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Kehadiran AUKUS juga akan menimbulkan peningkatan kapal selam atau kapal perang negara lain keluar masuk di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, adanya peningkatan intensitas patroli di wilayah Indonesia Timur yang dilakukan oleh kapal penjaga garis pantai yang dimiliki Badan Kemanan Laut dan Matra Laut dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan jika karena adanya AUKUS membuat Australia memiliki kapal selam berhulu ledak nuklir maka hal tersebut menjadi ancaman yang sangat nyata bagi Indonesia dan akan mengancam stabilitas kawasan (Farid 2023).

Ancaman lain yang akan dihadapi oleh Indonesia dari terbentuknya AUKUS ialah munculnya kemungkinan hubungan baik yang telah dibangun antara Indonesia dengan negara besar (*great power*) dunia yaitu Tiongkok atau Amerika menjadi buruk. Meskipun Indonesia menjadi negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok dan Amerika (AUKUS). Namun, kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia mengharuskan Indonesia mengambil sikap pada ketegangan yang terjadi tanpa harus melepaskan prinsip bebas aktif sebagai acuan politik luar negerinya (Putro 2021).

Kedekatan antara Indonesia dengan negara AUKUS dibuktikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia-Inggris di bidang pertahanan, Pada 16 September 2021 setelah pameran industri pertahanan di London, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia

melakukan pertemuan bilateral dengan Ben Wallace sebagai *Secretary of State Defence* untuk mencapai kesepakatan lisensi terkait produksi kapal tempur Inggris di Indonesia model Arrowhead 140. Pada 19 Oktober 2020 Indonesia dan Amerika Serikat menjalin kerjasama bilateral dalam sektor pertahanan dan keamanan maritim, implementasi kerjasama tersebut adalah pendanaan sebesar \$3,5 juta untuk pembangunan pusat pelatihan di Batam (Bamkala) (Nindya and Abiyya 2022).

Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Tiongkok sempat memanas karena adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok pada LCS karena klaim tersebut juga termasuk dalam wilayah Indonesia yaitu Laut Natuna. Tiongkok optimis bahwa LCS memiliki cadangan minyak 10 kali lipat lebih banyak dari yang dimiliki Amerika Serikat atau sekitar 213 miliar barel. Sementara itu, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa adanya cadangan minyak dan gas di wilayah tersebut setara dengan cadangan minyak milik Qatar yaitu sekitar 11 miliar barel minyak dan 190-900 triliun kubik gas alam. Namun, Tiongkok sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi ke Indonesia yang meningkat sebanyak 9% pada saat pandemi COVID-19 (Nindya and Abiyya 2022).

Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia menjadi salah satu variabel penting mengapa negara tersebut dapat menjadi ancaman. Secara historis, konflik antara kedua negara terkait aturan pembagian wilayah laut UNCLOS dapat menjadi pemicu konflik kedua negara, baik secara militer atau ekonomi seperti dalam melakukan patroli perairan maupun pengelolaan sumber daya laut dengan klaim aturan yang berbeda. Selain itu, dinamika terkait agresivitas Tiongkok di LCS

dan respon keras AS melalui Australia yang bergabung dengan AUKUS untuk membendung pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik memberikan suatu dilemma bagi Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berada di tengah pusaran konflik Tiongkok-AS seolah-olah semakin menekan dan mengancam Indonesia, terlebih pasca Australia bergabung dengan AUKUS. Meskipun Indonesia memiliki hubungan baik dengan Tiongkok dan negara anggota AUKUS, namun kedekatan geografis antara Indonesia-Australia serta dinamika konflik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik menjadi suatu potensi ancaman yang besar bagi keamanan dan pertahanan Indonesia. Potensi ancaman yang dihadapi Indonesia tidak dapat dihindari, sebab letak geografisnya dekat dengan Australia dan berada pada kawasan konflik antara kekuatan AS-Tiongkok di Indo-Pasifik.

BAB 3

Ancaman Keamanan *Offensive Capability & Aggressive Intentions* Australia Bagi Indonesia Pasca Pembentukan Aliansi Aukus 2021-2023

Setelah pada bab sebelumnya penulis menganalisis tingkat ancaman yang diberikan Australia terhadap Indonesia melalui faktor *Aggregate Power* dan *Geographic Proximity*, maka pada bab ini penulis akan melakukan analisis tingkat ancaman dari Australia menggunakan faktor *Offensive Capability/Power* dan *Aggressive Intentions* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt.

3.1 Ancaman Keamanan *Offensive Capability/Power* Australia Bagi Indonesia

Offensive Capability/Power (Kekuatan ofensif/Serangan) memiliki kaitan yang erat dengan *Aggregate Power* (Kekuatan agregat). Namun, kekuatan ofensif secara spesifik melihat sebuah negara dapat memberikan ancaman terhadap negara-negara lain dengan biaya yang dapat diterima, serta kemampuan mengubah kekuatan agregat menjadi kekuatan ofensif. Perubahan yang dimaksud adalah dengan cara memperkuat kemampuan militer dalam jumlah besar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor guna menentukan keuntungan relatif terhadap serangan ataupun pertahanan dalam waktu tertentu. Ancaman langsung yang dapat ditimbulkan dari kekuatan ofensif dapat menciptakan alasan kuat bagi negara lain untuk menyeimbangkan kekuatan. Tetapi, jika kekuatan ofensif dapat melakukan penaklukan dengan cepat, maka hanya sedikit kemungkinan untuk melawan bagi negara yang rentan (Walt 1990, 24–25).

Tabel 3.1 Perbandingan kekuatan Militer Indonesia-Australia 2023

Perbandingan Kekuatan Militer		Indonesia	Australia
Kekuatan militer Darat	Combat Tanks	314	59
	Armored Fighting Vehicles	12.008	33.414
	Self-Popelled Artillery	153	0
	Towed Artillery	414	48
	Rocket Projectors	63	0
Kekuatan Militer Udara	Fighters	41	24
	Dedicated attack	37	48
	Transports	67	38
	Trainers	127	98
	Helicopters	176	108
	Special Mission	17	31
	Aerial Tankers	1	6
	Attack helicopters	15	22
Kekuatan Militer Laut	Helicopter Carriers	0	2
	Submarines	4	6
	Destroyers	0	3
	Corvettes	21	0
	Frigates	10	8
	Patrol vessels	202	12
	Mine warfare	13	4

Sumber : GFP 2023

Dalam Kekuatan militer udara, pesawat tempur dan helikopter tempur menjadi kekuatan utama karena kegunaannya dalam pertempuran udara yang dapat melakukan serangan terhadap pesawat lain dan menjaga wilayahnya. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki 15 helikopter tempur serta 78 pesawat tempur berupa 41 pesawat fighters dan 37 pesawat dedicated (pencegat). Sedangkan Australia memiliki total 22 helikopter tempur dan 72 pesawat tempur yang berupa 24 fighters serta 48 dedicated attack. Kemudian untuk kekuatan militer wilayah laut, kepemilikan atas kapal pengangkut pesawat ataupun kapal pengangkut helikopter dianggap menjadi faktor penting dalam peperangan laut karena kemampuan untuk meluncurkan pesawat dan helikopter ke medan pertempuran di wilayah laut. Indonesia tidak memiliki kapal pengangkut pesawat ataupun helikopter, sedangkan Australia memiliki 2 kapal pengangkut helikopter (Putra, Akbar, and Widyarsa 2022; Global Fire Power 2023a).

Kapal Selam juga dapat mendukung kekuatan sebuah negara dalam pertempuran laut, karena kemampuan menyerang dan menyusup kewilayah musuh tanpa terdeteksi. Indonesia saat ini memiliki 4 kapal selam aktif bertenagakan diesel-listrik. Sedangkan Australia saat ini memiliki 6 kapal selam aktif bertenagakan diesel-listrik dan akan bertambah 8 kapal selam bertenaga nuklir setelah bergabung menjadi mitra AUKUS. Pada kekuatan militer darat, kepemilikan tank dan kendaraan lapis baja dipercaya sebagai indikator utama dalam mengukur kekuatan militer darat karena kegunaannya yang berada di garis depan saat terjadinya pertempuran. Indonesia saat ini memiliki 314 tank dan 12.008 kendaran lapis baja, sedangkan Australia memiliki 59 tank dan 33.414 kendaraan lapis baja (Putra, Akbar, and Widyarsa 2022; Global Fire Power 2023a).

Strategi defensif dan ofensif dalam politik internasional yaitu; saat negara mencoba mempertahankan wilayahnya dan juga sumber daya yang dimilikinya agar tidak dikuasai oleh negara lain termasuk dalam strategi defensif. Sedangkan strategi ofensif ialah saat negara menambahkan kekuatan militer dan sumber daya yang dapat memberikan ancaman kepada negara lain. Tindakan ofensif yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik mendorong Australia dan sekutunya melakukan *balancing* karena merasa terancam dengan agresivitas Tiongkok. Kesadaran dari Australia bahwa kekuatan militer yang dimiliki Tiongkok dapat melakukan serangan jarak jauh hingga ke wilayahnya memaksa Australia melakukan manuver politik dengan bergabung pada aliansi pertahanan bersama sekutunya sebagai tindakan defensif. Namun, adanya AUKUS dengan tujuan mengembangkan militer pada pertahanan Australia dapat memberikan efek terjadinya perlombaan senjata di kawasan. Pada akhirnya tujuan awal untuk defensif tersebut dapat berubah menjadi tindakan ofensif dimana hal tersebut menjadikan ancaman terhadap negara lain termasuk Indonesia (Putra, Akbar, and Widyarsa 2022).

Kekuatan kapal selam sendiri menjadi salah satu kekuatan ofensif yang penting bagi negara maritim seperti Indonesia, karena kemampuan kapal selam yang canggih mengakibatkan lawan tidak dapat mendeteksi masuknya kapal selam tersebut ke wilayahnya, hal tersebut menguntungkan bagi negara untuk melakukan strategi defensif maupun ofensif. Terlebih, presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) atau Global Maritime Axis (GMA). Serta, jika melihat sejarah yang mengatakan bahwa

“*Whoever controls the sea, rules the world*” menjadikan kekuatan maritim sebagai salah satu kekuatan penting yang harus diperhatikan (Santoso and Nafisah 2018).

Saat ini Australia memiliki 6 armada kapal selam diesel-listrik dengan kelas Collins yang dibangun pemerintah Australia melalui *Australian Submarine Corporation Pty Limited* (ASC) sejak tahun 1990an. Adanya AUKUS dalam pengembangan pertahanan Australia dengan pengadaan dan pembuatan 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan desain Inggris yang dipadukan menggunakan teknologi Amerika Serikat, Inggris dan Australia memberikan keuntungan bagi Australia dalam melakukan patroli lebih lama di kawasan Indo-Pasifik (Delanova 2021).

Nilai kesepakatan dalam pembangunan dan pengadaan SSN-AUKUS sebesar \$ 368 miliar, kesepakatan tersebut berupa 3 pembuatan SSN-AUKUS di Australia, kemungkinan besar 5 kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia dari Amerika Serikat yang ditargetkan akan dimiliki oleh Australia pada 2050. Richard Marles sebagai menteri pertahanan Australia mengatakan bahwa akan ada kemungkinan penambahan SSN-AUKUS dimasa depan. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak juga menyatakan bahwa SSN-AUKUS akan menjadi salah satu kapal selam bertenaga nuklir paling canggih yang ada di dunia. Kemudian Joe Biden (AS) menambahkan bahwa SSN-AUKUS akan menggunakan teknologi propulsi mutakhir serta memberikan kemampuan siluman dan manuver yang tidak tertandingi (Shepherd 2023).

Kelebihan kemampuan kapal selam tenaga nuklir dari kapal selam konvensional terletak pada kemampuan menyelam yang lebih lama. Kapal selam

konvensional (diesel-listrik) menggunakan generator diesel untuk mengisi baterai dan kemudian menggunakan listrik yang tersimpan untuk menjalankan mesinnya. Pengisian energi kapal selam konvensional harus muncul ke permukaan (*snorkeling*), hal tersebut membuat kapal selam konvensional menjadi rentan terdeteksi oleh musuh melalui udara dan kapal pemburu kapal selam. Sedangkan kapal selam tenaga nuklir tidak membutuhkan *snorkeling* dalam pengisian energinya dan dapat menyelam dengan waktu yang sangat lama bahkan hingga bertahun-tahun tergantung kemampuan bertahan personel dan persediaan yang dibawa. Kecepatan kapal selam nuklir juga dapat mencapai hingga 60 km/jam, sedangkan kapal selam konvensional hanya sekitar 30 km/jam (Groch and Lewis 2021).

Selain itu, kapal selam tenaga nuklir juga terkenal sangat senyap dari kapal selam konvensional hingga sulit di deteksi oleh musuh dan cocok dengan misi siluman yang berada di wilayah musuh. Karena kesenyapannya, pada 2009 kapal selam tenaga nuklir Inggris dan Prancis tidak sengaja bertabrakan di Samudera Atlantik. Selain itu, kapal selam tenaga nuklir juga memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal selam konvensional yang dapat membawa persediaan dan personel yang lebih besar (Groch and Lewis 2021). Pada 2021 sebelum adanya AUKUS, ada 6 negara yang memiliki kapal selam tenaga nuklir di dunia yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, India dan Inggris, setelah adanya AUKUS, Australia menjadi negara ketujuh yang akan memiliki kapal selam tenaga nuklir (Maisi 2023).

Indonesia setidaknya butuh 12 kapal selam untuk melindungi wilayah maritimnya, namun saat ini Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam setelah

tenggelamnya KRI Nanggala 403 di perairan Bali pada 21 April 2021. Kapal Selam milik Indonesia yang masih beroperasi saat ini ialah KRI Cakra 401 sebagai kapal selam tertua Indonesia buatan Jerman yang telah beroperasi sejak 1981, serta 3 kapal selam lainnya dengan kelas Nagapasa (KRI Nagapasa-403, KRI Ardedadali-404, KRI Alugoro-405) yang dibuat dari hasil kerjasama melalui PT. PAL Indonesia dan *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd* (DSME) dari Korea Selatan. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dapat membuat kapal selam sendiri, hal tersebut saat proses penggabungan (*Joint Section*) kapal selam KRI Alugoro-405 yang dilakukan di Indonesia (Susilo Eko 2023).

Pemerintah Indonesia pada 2021 memberikan dukungan pendanaan dalam pengembangan kapal selamnya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,28 Triliun. Potensi kerjasama dalam pembuatan ataupun pengadaan kapal selam Indonesia datang dari DSME Co Ltd (Korea Selatan), Naval Group (Prancis) dan *TyssenKrupp Marine Systems* (Jerman). Namun, Indonesia tidak dapat memiliki kapal selam dengan tenaga nuklir untuk menyeimbangi kapal selam yang akan dimiliki Australia pasca bergabung dengan AUKUS, karena akan melanggar *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) (Susilo Eko 2023).

Kemudian, adanya AUKUS memberikan kekhawatiran terhadap akuisisi Canberra terhadap Tomahawk dan rudal jarak jauh dari Amerika Serikat (Utami 2022). Akses yang diberikan Amerika Serikat terhadap rudal jarak jauh mereka untuk Australia melalui Pakta AUKUS akan meningkatkan kekuatan militer Australia secara signifikan menjadi kelas menengah dan memberikan peningkatan kapabilitas militer Australia menjadi lebih kuat dan disegani di kawasan (Mao 2021). Tomahawk sendiri ialah rudal jelajah subsonik jarak jauh yang saat ini

digunakan oleh kapal selam dan kapal perang dari Amerika Serikat dan Inggris. Rudal Tomahawk blok IV dirancang dapat terbang dengan ketinggian yang sangat rendah agar tidak terdeteksi oleh lawan dengan kecepatan subsoniknya mencapai 880km/jam serta dapat membawa muatan nuklir ataupun konvensional dan dapat digunakan oleh kapal yang bertenaga nuklir maupun konvensional. Kapal serang Amerika Serikat saat ini dilengkapi oleh rudal Tomahawk termasuk kapal selam kelas Virginia AS yang akan dimiliki Australia melalui pakta AUKUS (Naval Technology 2020).

Pada 21 Agustus 2023, Canberra resmi mengumumkan bahwa adanya investasi sebesar \$1,7 Miliar untuk berbagai sistem persenjataan paling kuat dan berteknologi maju yang pernah digunakan oleh *Australian Defence Force (ADF)*. Investasi tersebut berupa 200 rudal jarak jauh Tomahawk dengan total investasi \$1,3 Miliar, hal tersebut membuat Australia akan menjadi salah 1 negara yang memiliki rudal tomahawk termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Sebagai rudal jarak jauh kelas berat, rudal tersebut akan digunakan untuk kapal perusak kelas Hobart angkatan laut Australia. Kemudian, akuisisi sebesar \$431 Juta untuk lebih dari 60 *AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER)* produksi Amerika Serikat. Rudal tersebut akan digunakan untuk menargetkan sistem radar musuh yang akan dioperasikan pada pesawat Growler, Super Hornet dan dimasa yang akan datang untuk jet tempur F-35 Lightning II milik Angkatan Udara Australia (Australian Government Department of Defence 2023c).

AGM-88E termasuk dalam rudal udara ke darat supersonik jarak menengah yang mematikan. AGM-88E dikembangkan dari *AGM-88 High Speed Anti Radiation Missile (HARM)* angkatan laut Amerika Serikat. Kemampuan

menyerang *Integrated Air Defence* (IAD) yang dapat dipindahkan ke target lain, jarak yang dapat dijangkau hingga 105 km, menggunakan pencari multi mode untuk melawan kemampuan mencoba menghindari serangan rudal dengan cara menghamburkan radiasi musuh yang memungkinkan untuk menargetkan pada sumber dari radiasi yang dikeluarkan oleh musuh, memiliki sistem yang dapat dengan cepat menargetkan pertahanan udara musuh dan serangan yang tidak dapat dideteksi dengan radar yang kurang sensitif terhadap waktu dengan kecepatan luncur mencapai Mach 2 menjadikan AGM-88E sebagai rudal yang mematikan (Airforce Technology 2020).

Canberra juga menandatangani kontrak sebesar \$50 Juta untuk rudal anti-tank Spike-Long Range 2 yang akan dioperasikan pada kendaraan pengintai tempur Boxer Angkatan Darat Australia. Spike Long-Range 2 akan memberikan kemampuan untuk menyerang kendaraan lapis baja musuh pada jarak 5 hingga 10 kilometer (Australian Government Department of Defence 2023c). Rudal Spike-Long Range 2 adalah rudal terbaru generasi kelima dari senjata anti-tank Spike yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defence Systems (Israel). Spike Long-Range 2 dapat membawa dua jenis Hulu ledak yaitu: hulu ledak *High Explosive Anti Tank* (HEAT) yang dapat meningkatkan 30% kemampuan penetrasi lapis baja, dan hulu ledak *blast* (ledakan) yang dapat meledak didalam target untuk menimbulkan kerusakan yang lebih parah dengan menggunakan sekering *time-delay* (waktu-tunda). Spike Long Range 2 juga memiliki kemampuan pembatalan misi saat rudal sedang terbang dan memiliki dukungan kecerdasan buatan untuk pelacakan dan penguncian target dalam kondisi yang ekstrem membuat 33 negara di dunia menggunakan Spike Long Range 2 (Army Technology 2020).

Canberra juga mempercepat akuisisi dari Amerika Serikat untuk kemampuan serangan presisi jarak jauh, akuisisi ini akan digunakan oleh ADF dengan jumlah lebih dari dua kali lipat peluncur *High Mobility Artillery Rocket Systems* (HIMARS). Pemerintah Australia menginvestasikan sebesar \$1,6 Miliar untuk mempercepat dan memperluas program tersebut agar total HIMARS yang dimiliki menjadi 42. Selain itu, untuk mendukung percepatan akuisisi kemampuan serangan jauhnya, Departemen Pertahanan Australia sedang mengembangkan rencana *Guided Weapon Production Capability* (GWPC) secara terperinci di Australia agar dapat kompatibel dengan HIMARS yang akan dimulai pada tahun 2025 (Australian Government Department of Defence 2023b).

Kemampuan dari HIMARS telah diakui oleh Ukraina saat melakukan penyerangan terhadap Rusia yang menewaskan hingga ratusan tentara Rusia di wilayah Donetsk. Karena ketepatan akurasi HIMARS yang telah terbukti di konflik Ukraina-Rusia membuat Australia merasa harus memiliki kemampuan tersebut. Rudal HIMARS yang akan dimiliki Australia memiliki kemampuan dapat mencapai target hingga 300 kilometer. Saat ini, pemerintah Australia dan Amerika Serikat melakukan pengembangan terhadap kemampuan serangan presisi tersebut agar dapat mencapai target hingga 500 kilometer (Greene 2023). Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan HIMARS darat, jarak jauh, permukaan ke permukaan serta amunisi dan sistem pendukung tersebut akan memberikan peningkatan kekuatan untuk ADF secara signifikan (Australian Government Department of Defence 2023b)

Selain itu, pemerintah Australia juga menginvestasikan \$9,8 Miliar untuk membeli 20 pesawat C-130J Hercules canggih produksi Amerika Serikat.

Pengiriman pertama C-130J diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027 dan pesawat baru ini akan menggantikan dan menambah 12 pesawat Hercules yang saat ini sedang digunakan oleh Angkatan Udara Australia. C-130J digunakan oleh Australia sejak tahun 1999 dengan berbagai operasi dari kemanusiaan hingga konflik. Menurut Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy, penambahan 20 pesawat C-130J dianggap akan dapat menanggapi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Australia dimasa yang akan datang (Australian Government Department of Defence, 2023a).

Canberra juga telah menambahkan kekuatannya dengan mengakuisisi 40 helikopter perang Black Hawk UH-60M senilai \$2,7 Miliar yang mana 3 diantaranya telah berada di Australia dan akan segera diperkenalkan. Sebelum akuisisi ini, Australia telah memiliki 20 helikopter Black Hawk. Kepala Sistem Penerbangan (*Head Joint Aviation Systems*) pertahanan Australia Mayor Jendral Jeremy King mengatakan bahwa Black Hawk adalah helikopter yang digunakan untuk mengerahkan pasukan dan peralatan dengan andal, terbukti dan matang. Serta akuisisi atas Black Hawk sendiri dapat memperkuat hubungan antara Australia dan Amerika Serikat (Blenkin 2023)

Ancaman *Offensive Capability* Australia terhadap Indonesia. Australia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengubah kekuatan agregat menjadi kekuatan ofensif dari Indonesia. Anggaran militer Australia yang lebih dari Indonesia memberikan keuntungan dalam mengumpulkan dan mengembangkan kemampuan militernya menjadi lebih besar. Pasca bergabungnya Australia dalam pakta pertahanan AUKUS mengakibatkan kemampuan ofensif Australia naik secara signifikan dengan kepemilikan kapal selam tenaga nuklir kelas Virginia

seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan SSN AUKUS, serta senjata lainnya dari teknologi Amerika Serikat dan Inggris yang termasuk pada pengembangan kemampuan militer Australia dari adanya kerjasama AUKUS. Peningkatan kemampuan militer Australia pasca bergabung menjadi anggota AUKUS memberikan ancaman nyata terhadap keamanan Indonesia.

Kapabilitas ofensif yang dimiliki Australia setelah bergabung dengan AUKUS terlihat jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Bergabungnya Australia dengan AUKUS merupakan strategi ofensif yang bertujuan sebagai upaya *Balancing* terhadap ancaman Tiongkok di kawasan. Proyek kerja sama kapal selam tenaga nuklir yang menggunakan teknologi mutakhir tercanggih di dunia dengan berbagai keunggulannya menjadi bukti nyata bahwa Australia memiliki kapabilitas ofensif yang lebih tinggi dan memainkan peran *balancingnya*. Lebih lanjut, persenjataan rudal Tomahawk, AGM-88E, Spike Long Range 2, dan HIMARS semakin meningkatkan kapabilitas ofensif Australia untuk memainkan perannya, baik terhadap Indonesia maupun di kawasan. Berbagai keunggulan Australia tersebut menjadi ancaman yang dapat melakukan penaklukan dengan cepat terhadap Indonesia.

3.2 Ancaman Keamanan *Aggressive Intentions* Australia Bagi Indonesia

Negara-negara yang memiliki *Aggressive Intentions* (Keinginan/rencana Agresif) memungkinkan untuk memprovokasi negara lain untuk melakukan perlawanan terhadap mereka karena negara-negara agresif tersebut dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Dalam hal ini, Walt menggunakan contoh Nazi Jerman meghadapai koalisi penyeimbang yang sangat besar karena menggabungkan kekuatan besar dengan ambisi yang sangat agresif. Bahkan, negara yang tidak

memiliki kemampuan besar dapat mendorong negara lain untuk melakukan keseimbangan jika negara tersebut dianggap sangat agresif. Sebagai contoh, tindakan Libya mendorong Mesir, Israel, Prancis, Amerika Serikat, Chad, dan Sudan untuk melakukan koordinasi tanggapan politik dan militer terhadap kolonel Qadhafi. Apabila intensi agresor tidak dapat diubah oleh aliansi bersamanya, maka negara yang rentan kemungkinan akan menjadi korban bahkan jika telah bersekutu. (Walt 1990, 25).

Aggressive intentions pertama, Australia memberikan 22 kapal patroli baru kelas Guardian ke 13 negara di kepulauan pasifik yaitu; Papua Nugini, Timor Leste, Fiji, Federasi Mikronesia, Tonga, Kepulauan Solomon, Kepulauan Cook, Kiribati, Kepulauan Marshall, Palau, Samoa, Tuvalu, Vanuatu. Pemberian kapal patroli tersebut masuk dalam proyek *Pacific Patrol Boat Replacement* (PPB-R) (Austal Ships Pty Ltd 2023). Proyek tersebut muncul pada tahun 2014, mulanya proyek tersebut untuk menghadiahkan kapal patroli baru untuk 12 negara. Pada 2017 Timor Leste baru menyetujui menjadi negara ke 13 kepulauan pasifik yang menerima pemberian kapal patroli dari Australia. Pengiriman kapal patroli tersebut dimulai dari 2018 hingga 2024 dengan rincian; 4 kapal untuk Papua Nugini, 2 kapal untuk Tonga, 2 Kapal untuk Kepulauan Solomon, 2 kapal untuk Timor Leste dan Tuvalu, Samoa, Fiji, Palau, Kiribati, Vanuatu, Federasi Mikronesia, Kepulauan Cook masing-masing menerima 1 kapal dan untuk kapal ke 22 masih belum patroli dari Australia. Hingga saat ini Canberra menghabiskan dana sebesar \$504,3 Juta dalam proyek tersebut (Australian National Audit Office 2023).

Aggressive intentions kedua, pada tahun 2021 Australia memutuskan kerjasama yang telah disepakati bersama Prancis sebelum bergabung dengan

AUKUS. Perjanjian tersebut telah disepakati Canberra dengan Paris sejak 2016 dengan nilai kontrak \$90 Miliar atas pengadaan 12 kapal selam konvensional. Pemutusan Kerjasama yang diambil oleh Canberra membuat Paris sangat marah dan merasa ditikam dari belakang. Scott Morrison mengatakan bahwa Canberra membutuhkan kapal selam nuklir daripada kapal selam konvensional yang diusulkan oleh Prancis, sedangkan perusahaan yang memproduksi kapal selam Prancis (Naval Group) telah mengubah desain kapal selam nuklir miliknya menjadi kapal selam diesel seperti yang diinginkan dan dipesan oleh Australia. Penarikan duta besar Prancis di Australia dan Amerika Serikat menjadi tanda kekecewaan Paris terhadap kebijakan agresif dari Canberra (Willsher 2021). Pada bulan Juni 2022 Australia memberikan kompensasi sebesar €555 juta kepada Prancis sebagai penyelesaian yang adil terhadap masalah pemutusan kontrak kapal selam tersebut (Bachelier and Pajon 2022). Hal tersebut membuktikan bahwa Australia memiliki *aggressive intentions* terhadap negara besar seperti Prancis bahkan sebelum bergabung dengan AUKUS.

Aggressive intentions yang ketiga dari Australia ialah penambahan cakupan dari kerjasama pakta pertahanan AUKUS, pasca Canberra memutuskan bergabung pada kerjasama trilateral pengembangan pertahanan bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris (AUKUS) pada 2021. Pakta pertahanan militer trilateral pertama yang muncul selama tiga dekade terakhir di kawasan Asia-Pasifik. Dengan kapabilitas siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kapabilitas bawah laut termasuk kapal selam bertenaga nuklir sebagai cakupan awal dari kerjasama AUKUS (Alarsah 2022).

Adanya kapal selam bertenaga Nuklir akan membuat Australia menjadi salah satu negara yang memiliki kapal selam tenaga nuklir di dunia. Kemudian, cakupan kerjasama tersebut diperluas dengan kemampuan hipersonik dan kontra hipersonik, peperangan elektronik, pertukaran informasi dan inovasi pertahanan. Kekhawatiran terhadap pengembangan rudal hipersonik sendiri akan membuat kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan negara tetangga termasuk Indonesia karena waktu pengembangan dari senjata dan teknologi hipersonik lebih singkat dari SSN serta kekuatan ofensif dari rudal hipersonik dapat lima kali lebih cepat dari kecepatan suara dan memungkinkan untuk dimuat dengan senjata konvensional (Alarsah 2022). Penambahan cakupan dalam kerjasama trilateral tersebut akan memungkinkan Australia naik kelas secara signifikan dalam kemampuan militer dan memberikan ancaman terhadap negara lain termasuk Indonesia.

Abdul Kadir Jailani sebagai Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memiliki alasan untuk was-was dengan bergabungnya Australia ke dalam AUKUS dapat mengubah geopolitik di kawasan karena adanya pengembangan kapal selam tenaga nuklir yang memungkinkan akan muncul perlombaan senjata nuklir di kawasan (FPCI 2021). Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia juga memberikan komentar kekhawatirannya terhadap kebijakan yang diambil oleh Scott Morrison bahwa akan ada kemungkinan terjadi perlombaan senjata dan *power projection* di kawasan (Maisi 2023). Selain adanya kemungkinan perlombaan senjata dan *power projection* di kawasan seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, munculnya AUKUS juga memperkeruh keadaan antara

Tiongkok-Australia. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia karena jika terjadinya konflik antara kedua negara tersebut, kekuatan militer seperti; rudal, kapal selam, kapal perang milik Australia ataupun Tiongkok akan melewati wilayah dan mengganggu kedaulatan Indonesia karena letak geografis yang berada di tengah-tengah antara Australia-Tiongkok.

Aggressive intentions yang keempat, pada Januari 2022 Australia kembali melakukan kerjasama pada bidang militer dengan pengesahan *Japan-Australia Reciprocal Access Agreement* (RAA). Kerjasama dengan Jepang sebagai sekutu dari Australia dapat dikatakan tepat karena kedekatan antara Jepang dengan Amerika Serikat dan kekuatan militer Jepang berada pada peringkat 5 dunia pada tahun 2021 menurut Global Fire Power (Global Fire Power 2023c; Ulum and Windiani 2023).

Kerjasama RAA yang disahkan melalui pertemuan virtual oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas tiga poin kerjasama yaitu; penempatan pasukan militer (*status of forces*) pada masing-masing negara, latihan militer dan dukungan terhadap bencana. Penempatan pasukan militer (*status of forces*) di masing-masing negara memungkinkan setiap negara memiliki kemudahan dan jaminan untuk masuknya militer ke negara-negara tersebut yang dapat dipergunakan jika pada akhirnya akan terjadi perang maka kedua negara dapat mengirimkan militer sebagai bentuk aliansinya. Kemudian, latihan militer yang disetujui dari Australia dan Jepang merupakan sebuah kegiatan militer bersama yang dipersiapkan untuk menghadapi operasi militer, eskplorasi dampak peperangan, menguji strategi pertempuran, memastikan kesiapan tempur dengan menggunakan sumber daya militer yang akan

berdampak pada peningkatan pasukan militer dari kedua negara. Adanya kerjasama RAA juga akan memberikan ancaman terhadap Indonesia karena Australia memiliki aliansi kuat seperti Jepang dalam sektor militernya (Ulum and Windiani 2023).

Pemberian kapal patroli ke negara di kepulauan Pasifik dan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia menjadi tindakan yang dapat dikatakan sebagai keinginan agresif Australia dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, terlebih dengan pemberian kapal kepada Papua Nugini dan Timor Leste menjadikan dua negara tersebut dapat memihak Australia jika terjadi konflik antara Indonesia-Australia di kemudian hari. Pemutusan kerja sama terhadap Prancis juga menjadi bukti bahwa tindakan agresif yang dilakukan Australia benar-benar terjadi, bahkan terhadap negara besar seperti Prancis. Hal tersebut memungkinkan tindakan serupa yang akan dialami Indonesia. Selain itu, penambahan cakupan kerja sama diberbagai sektor semakin menjadi bukti keseriusan bahwa Australia ingin meningkatkan kapabilitas militernya dan mempermudah negara tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan agresif lainnya pada waktu yang akan datang.

Tak hanya itu, kerja sama militer melalui RAA antara Australia dengan Jepang juga menjadi bentuk upaya negara tersebut untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa Australia memainkan perannya untuk menjaga hubungan baik diluar aliansi AUKUS, yakni dengan sekutu AS seperti Jepang. Keputusan tersebut dapat dilihat bahwa Australia secara serius dalam menjalankan strategi *balancing* di kawasan dan turut menjadi ancaman kekuatan bagi Indonesia. *Balancing* yang dilakukan oleh Australia bisa dikatakan

sebagai *Agresive Intentions* terhadap Indonesia karena keinginan agresif dari Australia untuk mengembangkan kemampuannya secara signifikan dan dapat memberikan ancaman terhadap negara Indonesia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembentukan aliansi pertahanan AUKUS pada tahun 2021 merupakan fenomena baru yang dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan global. Bergabungnya Australia bersama AUKUS turut menjadi perhatian Indonesia yang memiliki kedekatan geografis dengan negara tersebut. Menteri Luar Negeri RI juga menyampaikan pandangannya bahwa aliansi tersebut dapat memicu proyeksi kekuasaan dan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Kemunculan pakta AUKUS menjadi salah satu agenda penting AS dalam melawan hegemoni Tiongkok di kawasan. Di sisi lain, Indonesia memiliki kedekatan ekonomi dengan Tiongkok, sehingga kemunculan AUKUS menciptakan dilema keamanan tersendiri bagi Indonesia. Ancaman yang diterima oleh Indonesia dapat dilihat berdasarkan empat faktor, yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capability*, dan *aggressive intentions*.

Aggregate Power yang lebih unggul dibandingkan Indonesia melalui kerja sama terkait kapal selam tenaga nuklir hingga kemampuan teknologi militer melalui kesepakatan ENNPIA, AURAS, hingga AQUA merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Kalkulasi GDP dan anggaran pertahanan yang jauh lebih besar turut mempengaruhi negara tersebut untuk semakin memperkuat sektor industri-militer dan teknologinya dari pada masa mendatang dan kekuatan agregat yang dimiliki Australia akan semakin tinggi.

Kemudian, *Geographic proximity* yang memperlihatkan dekatnya kawasan Indonesia dan Australia dengan berbatasan secara langsung. Sehingga, Australia dapat menjadi ancaman yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Agresivitas yang dilakukan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik dan Laut China Selatan membuat Australia merasa terancam, hingga melakukan *balancing* dengan bergabung bersama di AUKUS. Hal ini bertujuan agar dapat mengimbangi kekuatan dengan Tiongkok. Namun, AUKUS berdampak langsung terhadap Indonesia yang memiliki kedekatan geografis dengan Australia. Bahkan, karena kedekatan geografis yang berada di tengah-tengah antara Tiongkok dan AUKUS membuat hubungan baik Indonesia, Tiongkok, dan Amerika terancam. Hal ini dikarenakan Indonesia harus menentukan sikap terhadap pembentukan AUKUS. Kemudian, pembentukan kerjasama tersebut memungkinkan perlombaan senjata di kawasan, di mana Indonesia masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara dan Indo Pasifik.

Selanjutnya, *Offensive capability* Australia setelah bergabung dengan AUKUS jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Keputusan Australia dengan AUKUS merupakan upaya ofensif yang bertujuan sebagai *Balancing* terhadap ancaman Tiongkok di kawasan. Berbagai kerja sama untuk meningkatkan kapabilitas kapal selam dan rudal ditujukan sebagai tindakan ofensif Australia untuk memainkan perannya dalam memperkuat keamanan dan pertahanannya, dapat memberikan efek terjadinya perlombaan senjata di kawasan dan menjadi ancaman terhadap Indonesia.

Serta, *Aggressive intentions* yang dilakukan Australia beberapa tahun terakhir dapat dilihat sebagai upayanya untuk menjalankan strategi *balancing* di kawasan dan turut menjadi ancaman keamanan bagi Indonesia. *Balancing* yang

dilakukan oleh Australia merupakan bentuk *Agressive Intentions* terhadap Indonesia karena keinginan agresifnya untuk mengembangkan kemampuan militernya secara signifikan yang dapat memberikan ancaman terhadap negara lain termasuk Indonesia. Sehingga, kerja sama AUKUS dapat memberikan ancaman terhadap keamanan Indonesia dan stabilitas di kawasan.

Berdasarkan Teori *Balance of Threat* yang ditulis oleh Stephen M. Walt, berbagai upaya yang dilakukan oleh Australia untuk bergabung dengan AUKUS merupakan tindakan *balancing* dalam melawan ancaman Tiongkok di kawasan. Tindakan dalam meningkatkan kapabilitas militernya melalui berbagai kerja sama AUKUS dan diluar AUKUS juga menjadi poin penting bahwa Australia dapat menjadi ancaman bagi negara lain. Terlepas dari hal tersebut, keempat faktor yang menjadi variabel analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapabilitas Australia pasca bergabung dengan AUKUS menjadi ancaman serius bagi Indonesia.

4.2 Saran

Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai tingkat ancaman Australia terhadap Indonesia pasca pembentukan aliansi AUKUS. Tidak hanya terbatas dalam rentang waktu tersebut karena hingga pada tahun 2023 kerja sama AUKUS masih berlangsung. Maka, peneliti selanjutnya dapat meneliti dalam rentang waktu yang berbeda, baik dalam rentang waktu sebelum dibentuknya AUKUS maupun setelah pembentukan. Hingga *level of threat* terhadap negara lain, tidak hanya Indonesia. Akan tetapi tidak terbatas pada negara-negara yang berada dekat dengan wilayah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

Buku:

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia)*. Badan Pusat Statistik.

———. 2022. *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia)*. Badan Pusat Statistik.

———. 2023. *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook Of Indonesia)*. Badan Pusat Statistik.

Walt, Stephen M. 1990. *The Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press.

Jurnal:

Cheng, Manqing. 2022. "AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications." *European Journal of Development Studies* 2 (1): 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>.

Delanova, Mariane Olivia. 2021. "Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik." *Jurnal Dinamika Global* 6 (02): 259–85. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>.

Farid, Muchammad. 2023. "Kebijakan Australia Meningkatkan Jumlah Kapal Selam Bertenaga Nuklir (Pendekatan Studi Intelijen Startegis Pada Negara Indonesia)." *Journal of Internasional Relations (JoS) E-ISSN 2*. <https://doi.org/10.36232>.

Hafizh, Al, Pradono Budi Saputro, Laode Muhamad Fathun, Gerald Theodorus L, and Toruan. 2023. "Implementasi Kemitraan Strategis Indonesia-Australia Pasca Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS." *PIR Journal* 7 (2): 147–59. <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/1820/2194>.

Ilahi, Akhmad Fadli Rakhmat, and Safarudin Harefa. 2023. "Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir Di Laut Timor Antara Australia Dan Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2 (01): 49–57. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.164>.

Maisi, Omegadon Rutin. 2023. "Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS Bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota Dan Relevansi ASEAN." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (2): 1528. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3525>

Nindya, Annisa Putri, and Rifqy Alief Abiyya. 2022. "Pengaruh AUKUS Terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13 (1): 67–84. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>.

Nurfauzi, Alifsar, Frisca Lampita, and Muhammad Rizky Mahendra. 2022. "The Impact of AUKUS in Indonesian Perspective: Regional Military Balance and Security Dilemma." *Jurnal Sentris* 3 (2): 90–103. <https://doi.org/10.26593/sentris.v3i2.6079.90-103>.

- Nurfebriansyah, Ahmad Rifki, and Widyawati Boediningsing. 2023. "Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 17 (1): 9–14
- Putra, Yuda Dewi, Dhani Akbar, and Mohammad Riza Widyarsa. 2022. "Kerjasama Indonesia Dan Korea Selatan Di Bidang Pertahanan Dalam Konteks Transfer Of Technology Kapal Selam." *Student Online Journal* 3 (1): 941–47.
- Putri, Denny. 2021. "Respon Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia Di Wilayah Ashmore Reef." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 10 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3//index.php/politico/article/view/31581/30166>.
- Santoso, Dewi, and Fadhillah Nafisah. 2018. "Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations." *Jurnal Hubungan Internasional* 10 (2): 191. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7306>
- Ulum, Arfa Bahrul, and Reni Windiani. 2023. "Gejolak Indo-Pasifik: Analisis Kebijakan Australia Dalam Merespon Ancaman Tiongkok Di Kawasan Indo-Pasifik." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 9 (1): 413–26. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/38051/28711>
- Utami, Saskia Tasnim. 2022. "Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS Dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional* 28 (2): 199–221.
- Wicaksono, Taufan Aji, Lazarus Tri Setyawanta R, and Peni Susetyorini. 2019. "Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1977 Antara Indonesia Dan Australia." <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27782/24199>.

Website:

- Airforce Technology. 2020. "AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile." September 8, 2020. <https://www.airforce-technology.com/projects/agm-88e-advanced-anti-radiation-guided-missile/?cf-view>
- Alarsah, Chantika Salsabila. 2022. "AUKUS Beyond SSN: Alarming Hypersonic Arms Race Escalation,". <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/aukus-beyond-ssnalarming-hypersonic-arms-r>
- Alfiansyah, Iqbal Bagus, and Muhammad Fauzan Malufti. 2023. "Challenges to Underwater Sovereignty and Indonesia's Naval Modernization." *The Diplomat*, October 3, 2023. <https://thediplomat.com/2023/10/challenges-to-underwater-sovereignty-and-indonesias-naval-modernization/>.
- Army Technology. 2020. "Spike LR2 Anti-Tank Guided Missile." March 9, 2020. <https://www.army-technology.com/projects/spike-lr2/?cf-view>

- Austal Ships Pty Ltd. 2023. “Austal Australia Delivers 17th Guardian-Class Patrol Boat.” In . Austal Limited. <https://www.austal.com/news/austal-australia-delivers-17th-guardian-class-patrol-boat>
- Australia Government. 2018. “Plan of Action for the Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia.” <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/indonesia-australia-maritime-cooperation-action-plan.pdf>
- Australia Government Department of Defence. 2016. “2016 Defence White Paper.” Commonwealth of Australia. 2016. <https://www.defence.gov.au/sites/default/files/2021-08/2016-Defence-White-Paper.pdf>
- Australia Government Department of Foreign Affairs and Trade. 2020. “Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2020-2024.” 2020. from <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024>
- Australian Bureau of Statistics. (2021, June 20). *Population: Census*. Australian Bureau of Statistics <https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/population-census/2021>
- Australian Government Department of Defence. 2023a. “Multibillion Dollar Investment in New C-130J Hercules Aircraft.” Media Release Australian Government Department of Defence. July 24, 2023. <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2023-07-24/multibillion-dollar-investment-new-c-130j-hercules-aircraft>
- . 2023b. “Australia Accelerates Long-Range Precision Strike Capability Acquisition.” Media Release Australian Government Department of Defence . August 19, 2023. <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2023-08-19/australia-accelerates-long-range-precision-strike-capability-acquisition>
- . 2023c. “Australia Invest in Powerful New High-Tech Missiles.” Media Release Australian Government of Defence. August 21, 2023. <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2023-08-21/australia-invests-powerful-new-high-tech-missiles>
- Australian National Audit Office. 2023. “Pacific Patrol Boat Replacement (Project Data Summary Sheets).” https://www.anao.gov.au/sites/default/files/2023-02/Auditor-General_Report_2022-23_12_PDSS_19.pdf
- Australian Trade and Investment Commission. 2023. “Industries & Technology.” 2023. <https://www.globalaustralia.gov.au/industries-technologies>
- Bachelier, Jérémy, and Céline Pajon. 2022. “France and AUKUS: A Necessary Reconciliation.” *The Diplomat*, September 15, 2022. <https://thediplomat.com/2022/09/france-and-aucus-a-necessary-reconciliation/>
- Blenkin, Max. 2023. “First Army UH-60M Black Hawks Arrive in Australia.” *Australian Defence Magazine*, August 7, 2023. First Army UH-60M Black Hawks

- arrive in Australia. <https://www.australiandefence.com.au/defence/land/first-army-uh-60m-black-hawks-arrive-in-australia>
- FPCI. 2021. "AUKUS: Respons from Southeast Asia." In *Foreign Policy Community Indonesia*. Jakarta.
- Global Fire Power. 2023a. "Comparison of Indonesia and Australia Military Strength (2023)." 2023. <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=indonesia&country2=australia>
- . 2023b. "Defense Budget by Country (2023)." 2023 <https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.php>
- . 2023c. "Military Powers Ranked since 2005 According to Global Firepower." 2023. <https://www.globalfirepower.com/global-ranks-previous.php>.
- Greene, Andrew. 2023. "Australia to Buy Long-Range HIMARS Missile System from United States after Ukraine Praises Weapons Effectiveness Against Russia." *ABC News*, January 5, 2023. <https://www.abc.net.au/news/2023-01-05/australia-america-himars-missile-system/101827334>
- Groch, Sherryn, and Felicity Lewis. 2021. "What Is a Nuclear Submarine and Why Would You Want One?" *The Sydney Morning Herald*, September 16, 2021. <https://www.smh.com.au/national/what-is-a-nuclear-submarine-and-why-would-you-want-one-20210916-p58sep.html>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2023. "Industri Manufaktur Penyumbang Tertinggi Ekspor Periode Januari-April 2023." May 17, 2023. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24063/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Tertinggi-Ekspor-Periode-Januari-April-2023>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. n.d. "Peta Batas Maritim (Zee & Lk) RIAustralia." Accessed September 28, 2023, from <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/perbatasan.pdf>
- Mao, Frances. 2021. "AUKUS: Australia's Big Gamble on the US over China." *BBC News*, September 22, 2021. <https://www.bbc.com/news/world-australia-58635393>.
- Naval Technology. 2020. "Tomahawk Long-Range Cruise Missile." August 2020. <https://www.naval-technology.com/projects/tomahawk-long-range-cruise-missile/>.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. 2023. "Batas-Batas Geografis Benua Australia." *Kompas Cyber Media*, August 27, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/21/090000569/batas-batas-geografis-benua-australia>
- Putro, Yehuda Bimo Yudanto Purwanto Putro. 2021. "Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. November 17, 2021. <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>

- Shepherd, Tory. 2023. "Australia May Only Build Three of Eight Aukus Nuclear-Powered Submarines Locally." *The Guardian*, June 15, 2023.
<https://www.theguardian.com/world/2023/jun/15/australia-may-only-build-three-of-eight-aukus-nuclear-powered-submarines-locally>
- Susilo Eko, Yusuf. 2023. "Kapal Selam Sang Penjaga Wilayah Maritim Indonesia." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. April 17, 2023.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/16069/Kapal-Selam-Sang-Penjaga-Wilayah-Maritim-Indonesia.html>
- The White House. 2022. "FACT SHEET: Implementation of the Australia - United Kingdom - United States Partnership (AUKUS) ."
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/05/fact-sheet-implementation-of-the-australia-united-kingdom-united-states-partnership-aukus/>
- . 2023. "FACT SHEET: Trilateral Australia-UK-US Partnership on Nuclear-Powered Submarines." March 13, 2023. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/fact-sheet-trilateral-australia-uk-us-partnership-on-nuclear-powered-submarines/>
- Willsher, Kim. 2021. "Aukus: France's Ambassador Recall Is 'Tip of the Iceberg', Say Analysts." *The Guardian*, September 18, 2021.
<https://www.theguardian.com/world/2021/sep/18/aukus-france-ambassador-recall-is-tip-of-the-iceberg-say-analysts>.
- World Bank. 2023. "GDP (Current US\$)." 2023.
<https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators#>